

SKRIPSI

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),
DANA PERIMBANGAN, DAN PENERIMAAN ZAKAT
TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN
DI PROVINSI ACEH**



Disusun Oleh:

MISKA FIRDAUS

NIM. 140602109

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019 M / 1440 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Miska Firdaus
NIM : 140602109
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



MISKA FIRDAUS
NIM. 140602109

**LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI
SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ekonomi Syariah

Dengan Judul:

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),
DANA PERIMBANGAN, DAN PENERIMAAN ZAKAT
TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN
DI PROVINSI ACEH**

Disusun Oleh:

Miska Firdaus
NIM: 140602109

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi

Pada Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,



Cut Dian Fitri, SE, M.Si., Ak. C.A
NIP. 1983070920140322002

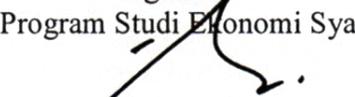
Pembimbing II,



Hafidhah, M.Si., Ak. C.A
NIDN. 2012108203

Mengetahui

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah


Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP. 197103172008012007

LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL SKRIPSI

Disusun Oleh:

Miska Firdaus
NIM. 140602109

Dengan Judul:

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA
PERIMBANGAN, DAN PENERIMAAN ZAKAT TERHADAP
TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI ACEH**

Telah diseminarkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan
Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata 1 dalam bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 18 Juli 2019 M
15 Dzu-Qa'dah 1440 H

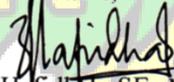
Banda Aceh

Tim Penilai Seminar Hasil Skripsi

Ketua,

Sekretaris,


Cut Dian Fitri, SE, M.Si., Ak. C.A
NIP. 1983070920140322002


Hafidnah, SE, M.Si., Ak. C.A
NIDN. 2012108203

Penguji I,

Penguji II,


Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP. 196403141992031003


Winny Dian Safitri

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP. 196403141992031003

LEMBAR MOTO DAN PERSEMBAHAN MOTO

Surat Al-Maidah ayat 2 (Al-Quran dan Terjemahannya)

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:”dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah amat berat siksaannya”. (QS.Al-Maidah:2).

PERSEMBAHAN

Semua yang ada pada diri manusia merupakan karunia dari keagungan Allah SWT, sepantasnya manusia mensyukuri atas segala nikmat dan kasih sayang yang diberikan kepada seorang hamba.

Adapun skripsi ini tidak terlepas dari sehelai ridha dan doa dari orang tua, keluarga dan semua orang yang telah mendoakan skripsi ini selesai.

Pujian selalu tucurahkan, semangat selalu diberikan dalam pengerjaan dan penyelesaian skripsi ini merupakan dukungan dan motivasi yang luar biasa sahabat berikan semoga Allah membalas ketulusan mereka. Amin.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Miska Firdaus
NIM : 140602109
Fakultas/Jurusan : FEBI/ES
E-mail : Miskhafeerdaus@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKK Skripsi yang berjudul:

Analisis Praktik Gadai Sawah Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Lamtrieng (Studi Kasus Pada Desa Lamtrieng Kec. Kuta Baro, Kab. Aceh Besar)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain

secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 01 Januari 2020

MENGETAHUI

Penulis

(Miska Firdaus) (Cut Dian Fitri, SE.M.Si.Ak.C.A)

NIP. 1983070920140322002

Pembimbing I

Pembimbing II

(Hafidhah, SE.M.Si.Ak.C.A)

NIDN. 2012108203

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA PERIMBANGAN, DAN PENERIMAAN ZAKAT TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI ACEH”. Shalawat beriring salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di muka bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nilam Sari, Lc., M.Ag dan Cut Dian Fitri, SE. M.Si., Ak., CA selaku ketua dan sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah UIN -AR-Raniry.

3. Cut Dian Fitri, SE,M.Si.Ak.C.A selaku dosen pembimbing I dan sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah UIN -AR-Raniry.yang telah meluangkan waktu membimbing dengan sabar, memberikan arahan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Hafidhah, SE,M.Si.Ak.C.A selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu membimbing dengan sabar, memberikan arahan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Khairul Amri. SE., M. Si selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Jurusan Ekonomi Syariah. Terima kasih sebesar-sebarnya telah memberi nasehat dan masukan baiknya kepada penulis.
6. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry yang telah banyak memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
7. Taman baca Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry, tempat penulis memperoleh berbagai informasi dan sumber-sumber yang berkaitan dalam penulisan.
8. Teristimewa untuk Ayahanda Tgk. Sumardy Tarmisal dan Ibunda tercinta Salmia yang selalu menyayangi penulis dan memberikan semangat dan motivasi baik moril maupun materil, dan kepada seluruh anggota

keluarga yang telah memberikan dukungan dan arahan penulis ucapkan terima kasih.

9. Teman-teman satu atap dan seperjuangan saya ucapkan terima kasih, yang telah memberikan bantuan, semangat dan motivasi penulis ucapkan terima kasih.
10. Kepala Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh beserta karyawan yang telah menyediakan dan membantu saya dalam memperoleh data guna menunjang penelitian yang peneliti lakukan.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu dan mohon maaf kepada semua pihak baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih ada kekurangan, oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 18 Juli 2019
Penulis,

MISKA FIRDAUS
NIM. 140602109

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor:158 Tahun 1987–Nomor:0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidakdilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fatḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِي	<i>Fatḥah dan ya</i>	Ai
◌ِو	<i>Fatḥah dan wau</i>	Au

Contoh:

Kaifa : كيف

Haula : هول

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
ا / ي	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
ي	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

qāla: قَالَ

ramā: رَمَى

qīla: قِيلَ

yaqūlu: يَقُولُ

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة)hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, sertabacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

al-Madīnah al-Munawwarah/ :

لِمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ

al-Madīnatul Munawwarah

Ṭalḥah:

طَلْحَةَ

**Catatan:
Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Miska Firdaus
NIM : 140602109
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan Dan Penerimaan Zakat Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Aceh
Tebal Skripsi :
Pembimbing I : Cut dian fitri, SE., M.Si,Ak. CA
Pembimbing II : Hafidhah, SE., M.Si,Ak. CA
Kata Kunci : Analisis Data Panel, Common Effect Model, Fixed Effect Model, Random Effect Model, Aceh

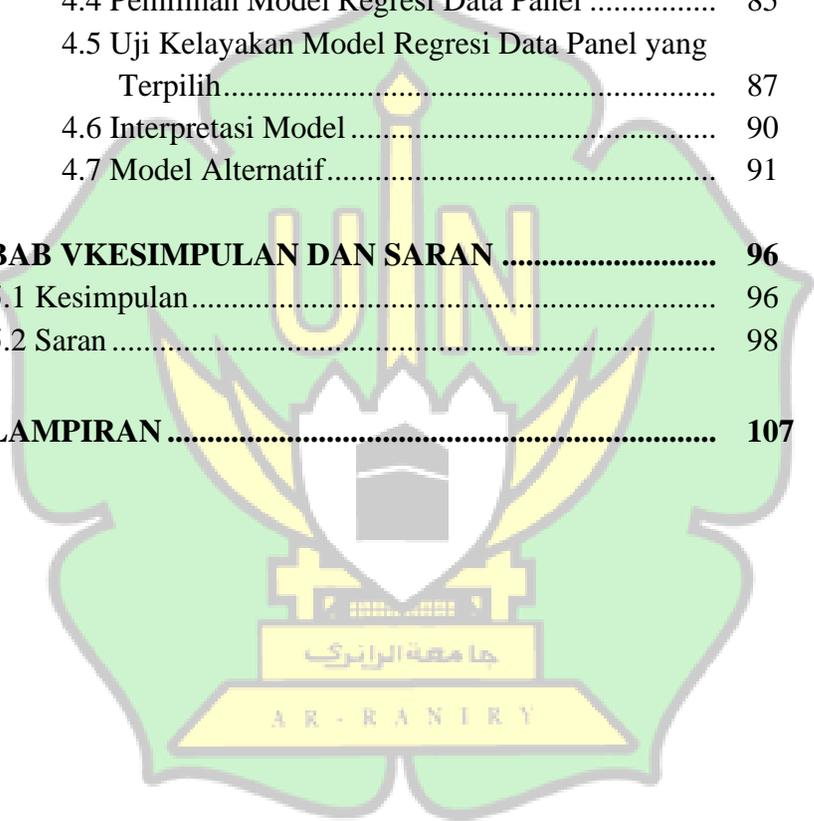
Penelitian ini mengkaji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan zakat terhadap pesentase kemiskinan di Provinsi Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan zakat terhadap pesentase kemiskinan di Provinsi Aceh. Data yang digunakan adalah data jumlah realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), jumlah realisasi penerimaan dana perimbangan penerimaan zakat, dan persentase kemiskinan di 23 Kabupaten/Kota Provinsi Aceh dengan rentang waktu dari tahun 2013 sampai dengan 2017. Teknik analisis berupa regresi data panel, dengan menentukan model regresi terbaik dari ketiga model regresi data panel yaitu *common effect model*, *fixed effect model* dan *random effect model*. Model yang terpilih dari uji *Chow* dan Uji *Hausmant* adalah model *fixed effect model*. Nilai R^2 pada model ini diperoleh sebesar 42,05%. Uji parsial menunjukkan yang berpengaruh terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh adalah variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan zakat. Uji simultan menunjukkan semua variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan zakat berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL KEASLIAN	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL SKRIPSI	iv
LEMBAR MOTO DAN PERSEMBAHAN MOTO.....	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ABSTRAK.....	ix xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.5 Sistematika Pembahasan	13
BAB II LANDASAN TEORI.....	16
2.1 Kemiskinan	16
2.1.1 Macam – Macam Kemiskinan	18
2.1.2 Ukuran Kemiskinan	20
2.1.3 Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan	21
2.2 Pendapatan Asli Daerah	23
2.2.1 Pajak Daerah	25
2.2.2 Retribusi Daerah	27
2.2.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	

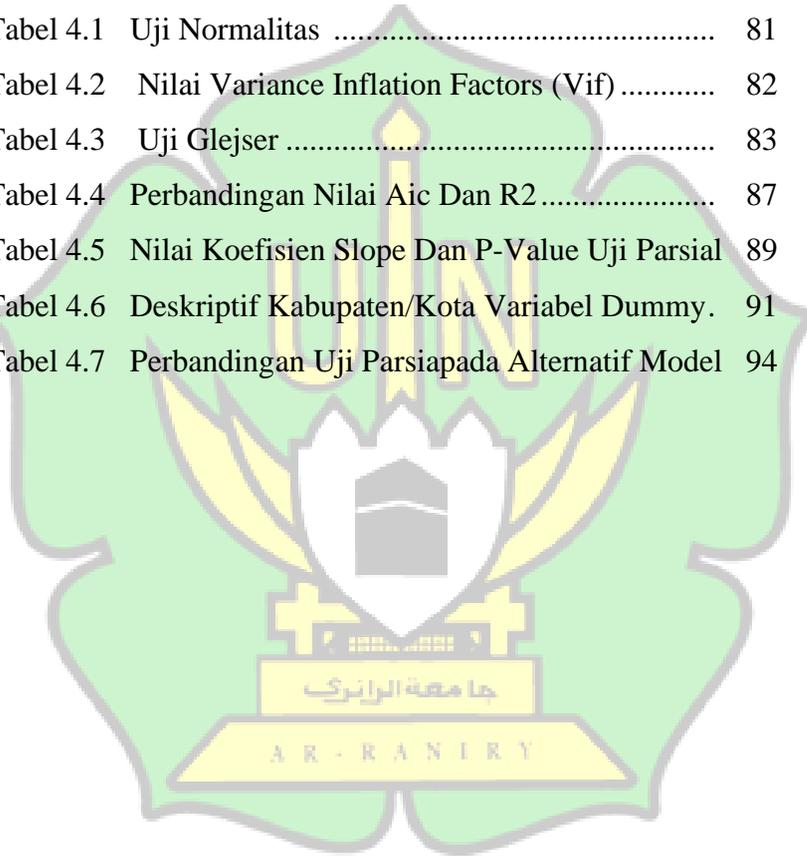
Dipisahkan.....	29
2.2.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	30
2.3 Dana Perimbangan	31
2.3.1 Dana Alokasi Umum.....	32
2.3.2 Dana Alokasi Khusus.....	35
2.3.3 Dana Bagi Hasil	37
2.4 Zakat.....	40
2.4.1 Dalil-Dalil Zakat	41
2.4.2 Syarat dan Rukun Zakat.....	43
2.4.3 Jenis-Jenis Harta Zakat	44
2.4.4 Macam-macam Zakat.....	44
2.5 Penelitian Terkait	46
2.6 Keterkaitan Antar Variabel	50
2.7 Kerangka Berfikir.....	53
2.8 Hipotesis.....	53
BAB III METODE PENELITIAN.....	55
3.1 Jenis Penelitian.....	55
3.2 Jenis Data	55
3.3 Operasional Variabel.....	56
3.4 Metode Analisis	58
3.5 Estimasi Model Data Panel	60
3.6 Pemilihan Model Regresi Data Panel	61
3.6.1 Uji Chow.....	61
3.6.2 Uji Hausman	63
3.7 Uji Asumsi Klasik.....	65
3.7.1 Uji Normalitas.....	65
3.7.2 Uji Multikolinearitas	65
3.7.3 Uji Heteroskedastitas	66
3.8 Uji Signifikan	66

BAB IV HASIL PENELITIAN	71
4.1 Statistika Deskriptif.....	71
4.1.1 Kemiskinan	71
4.1.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	74
4.1.4 Zakat	78
4.2 Pengujian Asumsi	81
4.3 Estimasi Model Data Panel	84
4.4 Pemilihan Model Regresi Data Panel	85
4.5 Uji Kelayakan Model Regresi Data Panel yang Terpilih.....	87
4.6 Interpretasi Model	90
4.7 Model Alternatif.....	91
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	 96
5.1 Kesimpulan.....	96
5.2 Saran	98
 LAMPIRAN	 107



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Persentase Penduduk Miskin Provinsi Aceh ...	4
Tabel 1.2	Pendapatan Asli Daerah Provinsi Aceh.....	9
Tabel 2.1	Penelitian Terkait.....	48
Tabel 4.1	Uji Normalitas	81
Tabel 4.2	Nilai Variance Inflation Factors (Vif)	82
Tabel 4.3	Uji Glejser	83
Tabel 4.4	Perbandingan Nilai Aic Dan R2	87
Tabel 4.5	Nilai Koefisien Slope Dan P-Value Uji Parsial	89
Tabel 4.6	Deskriptif Kabupaten/Kota Variabel Dummy.	91
Tabel 4.7	Perbandingan Uji Parsi pada Alternatif Model	94



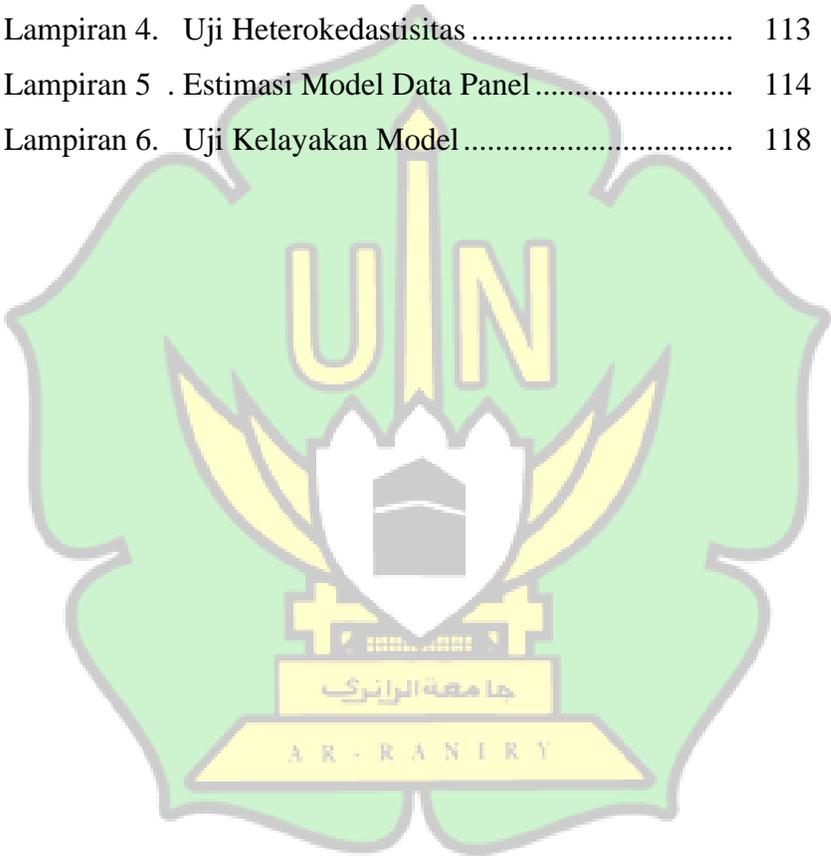
DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Persentase Kemiskinan Kabupaten/Kota	72
Gambar 4.2	Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota ...	76
Gambar 4.3	Dana Perimbangan Kabupaten/Kota	77
Gambar 4.4	Penerimaan Zakat Kabupaten/Kota	79



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Tabulasi Data Penelitian	107
Lampiran 2. Uji Normalitas.....	112
Lampiran 3. Uji Multikolinieritas.....	112
Lampiran 4. Uji Heterokedastisitas	113
Lampiran 5 . Estimasi Model Data Panel	114
Lampiran 6. Uji Kelayakan Model.....	118



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan persoalan klasik yang telah ada sejak umat manusia ada. Sampai saat ini belum ditemukan suatu rumusan maupun formula penanganan kemiskinan yang dianggap jitu dan sempurna sehingga harus dikembangkan (Kurniawan, 2017). Kemiskinan juga disebut masalah multidimensi dan lintas sektor yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan antara lain tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender dan kondisi lingkungan. Kemiskinan sebagai suatu fenomena sosial yang tidak hanya dialami oleh Negara sedang berkembang tetapi juga terjadi di Negara yang sudah maju dan mempunyai kemampuan di bidang ekonomi seperti Inggris dan Amerika Serikat (Rusmiyati, 2012).

Indonesia sebagai salah satu Negara yang sedang berkembang juga tak lepas dari problematika kemiskinan yang melanda. Di Indonesia, strategi pembangunan yang diprioritaskan pada pemerataan hasil-hasil pembangunan dimulai sejak PELITA III. Ini sejalan dengan amanat Garis Besar Haluan Negara (GBHN), bahwa arah dan tujuan pembangunan Indonesia harus dapat dimanfaatkan bagi peningkatan, kesejahteraan rakyat, dan hasil-hasil yang dicapai harus dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat

Indonesia. Tujuan pembangunan tersebut erat kaitannya dengan upaya mengurangi kemiskinan dan kesenjangan pendapatan (Kuncoro, 2014).

Kesejahteraan rakyat merupakan tujuan utama dari sistem ekonomi Indonesia. Melalui kebijakan fiskal. Pemerintah Indonesia terus berupaya menjalankan fungsinya guna mencapai tujuan dari sistem ekonomi nasional tersebut. Secara lebih khusus, kebijakan fiskal bertujuan meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan laju investasi, meningkatkan stabilitas meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasional (Ismail, Santosa, dan Yustika, 2014).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah kemudian dianggap membawa semangat demokrasi didalamnya, karena memuat kebijakan otonomi daerah, yang akan memberikan kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengatur dan menata rumah tangganya sendiri. Artinya Undang-Undang ini membawa dua hal pokok dalam kehadirannya yakni adanya otonomi daerah yang merupakan konsekuensi logis dari dianutnya azas desentralisasi, serta adanya jiwa demokratis yang terkandung didalamnya. Namun, dalam pelaksanaannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 masih ditemukan berbagai kekurangan sehingga mengalami revisi dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan daerah

otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Nadir, 2013).

Otonomi daerah yang juga dikenal dengan desentralisasi fiskal diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui fasilitas-fasilitas publik yang layak dan memadai guna membantu penduduk miskin yang ada kabupaten/kota. Desentralisasi fiskal akan memberikan dampak positif terhadap pengurangan jumlah penduduk miskin bila diikuti dengan adanya kenaikan pada pendapatan perkapita. Peningkatan pendapatan merupakan cermin dari adanya pertumbuhan ekonomi. Daerah yang potensial akan menghasilkan produk berupa barang dan/atau jasa yang mempunyai nilai guna untuk meningkatkan penjualan dan daya tarik kepada konsumen. Desentralisasi fiskal tidak hanya dapat mengetahui masalah kemiskinan tetapi dapat menjadi pendorong untuk prospek pertumbuhan ekonomi di daerah otonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan sehingga dapat menurunkan jumlah penduduk miskin (Sudewi, 2013).

Provinsi Aceh dengan 23 kabupaten/kota merupakan Provinsi paling ujung sebelah barat Indonesia yang juga menjadi bagian dalam otonomi daerah sebagai daerah otonomi.

Meskipun demikian, Provinsi ini juga memiliki tingkat kemiskinan tinggi yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.1 yang menjelaskan bahwa tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh masih tinggi meski mengalami penurunan di tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan data kemiskinan yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tersebut, Provinsi Aceh dengan persentase kemiskinan mencapai 16,89% di tahun 2017 menjadikan Aceh sebagai Provinsi dengan persentase kemiskinan tertinggi di Sumatera dan menempati posisi ke enam tertinggi di Indonesia. Sehingga dapat diartikan bahwasanya suatu daerah yang telah diberi kewenangan melalui otonomi daerah tidak serta merta dapat menyelesaikan problematika di wilayah tersebut, apalagi permasalahan kemiskinan yang bersifat multidimensi dengan bermacam tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah.

Tabel 1.1
Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Aceh

Tahun	Penduduk Miskin (%)
2013	19,48
2014	18,08
2015	17,08
2016	16,73
2017	16,89

Sumber: Badan Pusat Statistik (2019)

Sebagai penyelenggara Negara, Pemerintah wajib menjalankan amanah Undang-Undang untuk mengentaskan kemiskinan. Usaha-usaha yang dilakukan khususnya Pemerintah daerah dituangkan dalam program strategis untuk menanggulangi kemiskinan. Otonomi daerah memberikan peran yang nyata pada pemerintah Kabupaten dan Pemerintah kota untuk mengelola daerah nya diberbagai bidang termasuk diantaranya program pengentasan kemiskinan (Masyitah dan Mislinawati, 2017).

Untuk melaksanakan otonomi daerah melalui penerapan program-program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, diperlukan tersedianya dana yang cukup memadai. Dalam sistem otonomi daerah keuangan daerah diperoleh dari penerimaan daerah yang berasal dari daerah itu sendiri maupun dari pemerintah pusat sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Penerimaan tersebut diantaranya ialah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penerimaan Pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah/daerah yang bersangkutan, yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain penerimaan yang sah (Adisasmita, 2014).

Pendapatan asli daerah di setiap daerah berbeda-beda, tergantung bagaimana kemampuan daerah tersebut dalam

menggali sumber pendapatan dan mengolah sumber daya yang ada, yang nantinya akan digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan pembangunan daerah guna tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan tabel 1.2, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh mengalami kenaikan dari beberapa tahun sebelumnya, dapat diartikan bahwa adanya keberhasilan Pemerintah Aceh dalam mengelola sumber daya dan asset daerah. Namun demikian hal ini tidak merefleksikan pada penurunan tingkat kemiskinan, dimana Provinsi Aceh yang masih tinggi sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Selain Pendapatan Asli Daerah (PAD), sumber-sumber keuangan daerah juga berasal dari dana perimbangan untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Dana perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai pembangunan juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah. Dana perimbangan secara rata-rata di Indonesia dihitung sebesar 80% dari penerimaan daerah. Apabila realisasi belanja lebih tinggi dari pada pendapatan

daerah maka akan terjadi defisit. Oleh karena itu untuk menutup kekurangan belanja daerah maka Pemerintah pusat mentransfer dana dalam bentuk dana perimbangan kepada Pemerintah daerah. Dana perimbangan yang diterima pemerintah Aceh mengalami kenaikan yang cukup besar dari tahun sebelumnya, sebagaimana yang telah digambarkan pada tabel 1.2. Di satu sisi dana tersebut menjadi suntikan modal bagi daerah guna merealisasikan program-program pembangunan, namun di sisi lain hal ini justru mendeskripsikan kemandirian suatu daerah masih kurang dikarenakan semakin besar transfer dana perimbangan yang diterima dari Pemerintah pusat akan memperlihatkan semakin kuat Pemerintah daerah tergantung kepada Pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhannya. Sehingga akan membuat kinerja keuangan daerah menurun (Andirfa, Basri, dan Majid, 2016).

Selain pendapatan asli daerah dan dana perimbangan yang merupakan bagian dari pendapatan daerah, Provinsi Aceh juga memiliki sumber keuangan lain yang dikelola langsung oleh Pemerintah melalui lembaga Baitul Mal, yakni dana zakat. Berdasarkan etimologi (istilah) syariat, zakat sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Sulaiman dalam bukunya menyebutkan bahwa zakat merupakan rukun Islam ke-3 setelah mengucapkan kalimah syahadat dan shalat sehari semalam lima waktu. Ia

mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Ibadah tersebut mempunyai dua sisi. Pertama, sebagai ibadah mahdah yang merupakan ungkapan pengabdian hamba kepada Allah SWT dengan tulus ikhlas. Kedua, sebagai ibadah yang menyangkut kepentingan atau terlibat manusia secara nyata.

Sebagai ibadah yang terkait dengan manusia, maka zakat memiliki sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaannya. Sasaran tersebut yaitu menolong atau membantu mereka (fakir-miskin) yang berada dalam kondisi ekonominya kurang mampu. Bantuan itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus tepat dan dapat diberdayakan. Pelaksana yang tidak profesional akan mengakibatkan tidak terpenuhi sasaran tersebut. Hal ini bermakna bahwa persyaratan zakat oleh Allah SWT mempunyai muatan ekonomi yang cukup strategis. Pelaksanaan yang profesional akan mendapatkan dua sisi kebaikan. Pertama mendapat pahala dari Allah SWT dan kedua memberikan dampak positif sesama manusia (Sulaiman, 2013:29-30).

Di dalam Islam zakat menjadi alternatif dalam pengentasan kemiskinan, karena pada esensinya zakat adalah pengelolaan dana yang diambil dari *aghniya* untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya. Hal ini jelas bahwa adanya transfer material melalui zakat yang dikeluarkan oleh pihak yang memiliki harta dan telah mencapai syarat tertentu yang kemudian dana tersebut akan didistribusikan kepada masyarakat

kalangan ekonomi rendah selaku pihak yang berhak menerimanya (Andryanto, 2011). Provinsi Aceh yang mayoritas penduduk beragama Islam dan juga Provinsi yang menerapkan syariat Islam memiliki potensi besar di bidang zakat. Hal ini tentu nya dapat memberikan dampak positif bagi pengentasan kemiskinan. Penerimaan zakat yang diperoleh oleh Provinsi Aceh pada tiap tahun mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Sebagaimana data penerimaan zakat yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh pada tabel 1.2 di bawah ini.

Tabel 1.2
Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan,
dan Penerimaan Zakat Provinsi Aceh Tahun 2013-2017

No	Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Juta Rupiah)	Dana Perimbangan (Juta Rupiah)	Penerimaan Zakat (Juta Rupiah)
1	2013	1.019.845	13.087.516	83.711
2	2014	1.910.113	14.176.254	132.164
3	2015	2.045.109	14.770.747	156.155
4	2016	2.638.893	18.637.115	177.775
5	2017	2.660.161	17.876.386	193.314

Sumber: Badan Pusat Statistik (2019)

Dalam penelitian ini diangkat tema tentang tingkat kemiskinan karena merupakan permasalahan yang dialami di tiap daerah. Penelitian semacam ini telah dilakukan sebelumnya di wilayah penelitian yang berbeda. Manek dan Badrudin (2016) melakukan penelitian di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hasil penelitian menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan dan dana perimbangan tidak memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kemiskinan. Sedangkan Paat, Koleangan, dan Rumat (2017) melakukan penelitian yang sama di Kota Bitung. Dari hasil penelitian ditemukan bahwasanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan dan signifikan secara statistik dan dana perimbangan berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di Kota Bitung akan tetapi tidak signifikan secara statistik. Kedua penelitian ini mengungkapkan bahwa pendapatan asli daerah menunjukkan hasil yang sama sedangkan dana perimbangan menunjukkan hasil yang berbeda. Sehingga hal ini menarik dikaji kembali dengan variabel yang sama namun di wilayah penelitian yang berbeda.

Penelitian ini merupakan ekstensi dari penelitian terdahulu, perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah adanya penambahan variabel zakat, sedangkan unit analisis dalam penelitian ini adalah 23 Kabupaten/kota di Provinsi Aceh dengan periode penelitian dilakukan selama 5

tahun yaitu dari tahun 2013 sampai dengan 2017. Pengujian hipotesis dilakukan dengan regresi linear berganda dan menggunakan data panel. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Penerimaan Zakat Terhadap Tingkat Kemiskinan.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan penerimaan zakat secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh.
2. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh.
3. Apakah dana perimbangan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh.
4. Apakah penerimaan zakat berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji dan menganalisis:

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh.
2. Pengaruh dana perimbangan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh.
3. Pengaruh penerimaan zakat terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh.
4. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan penerimaan zakat secara bersama-sama terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini ialah:

Manfaat Praktis (Operasional)

- 1) Penelitian ini dapat memberi pengetahuan tentang bagaimana hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Dana Zakat terhadap kemiskinan di wilayah Provinsi Aceh.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan-kebijakannya.

Manfaat Teoritis (Akademis)

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi akademisi mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan penerimaan zakat terhadap tingkat kemiskinan khususnya di wilayah Provinsi Aceh.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pelengkap bagi penelitian-penelitian sebelumnya dan dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan penerimaan zakat terhadap tingkat kemiskinan khususnya di wilayah Provinsi Aceh.

1.5 Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai latar belakang masalah yang ingin di dikaji dalam penelitian ini. Dari latar belakang yang diuraikan tersebut kemudian dikemukakan pula rumusan masalah nya sebagai titik utama penelitian. Selain itu peneliti juga memberi gambaran tentang tujuan dari penelitian beserta manfaat yang diharapkan dapat tercapai dari hasil penelitian ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis menguraikan teori-teori yang berkenaan dengan variabel-variabel yang berkaitan dengan judul yang diangkat dalam skripsi ini. Untuk memperkuat penelitian ini penulis juga menyertakan temuan-temuan penelitian terdahulu yang terkait. Kemudian penulis menetapkan kerangka pemikiran yang nantinya menjadi patokan dasar dalam melakukan penelitian serta dilengkapi dengan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai jenis penelitian yang akan dilakukan yang disertakan jenis data dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian. Kemudian penulis menguraikan mengenai metode analisis yang disertakan dengan langkah yang akan dijalankan dalam melakukan analisis terhadap data yang digunakan.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini hasil analisis dimuat secara mendalam tentang hasil temuan dan menjelaskan implikasi nya. Pada hasil penelitian nantinya dikemukakan proses analisis yang dilakukan dengan alat analisis yang telah diuraikan pada Bab III, yang disertai dengan hasil pengujian hipotesis.

BAB V PENUTUP

Merupakan bagian penutup dari pembahasan skripsi yang memuat kesimpulan mengenai analisis yang telah dilakukan dan hasil pengujian hipotesis. Kemudian penulis juga memberikan saran yang dapat memberikan dampak positif bagi penelitian selanjutnya.



BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Kemiskinan

Kemiskinan adalah taraf hidup yang rendah atau suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang maupun papan (Elly, Setiadi, dan Kolip, 2011:788).

Kasim (2006:57-59) menguraikan beberapa definisi yang dipaparkan oleh para pakar sebagai berikut :

1. Levitan, kemiskinan adalah kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak. Karena standar hidup itu berbeda-beda, maka tidak ada definisi kemiskinan yang diterima secara universal.
2. Schiller, kemiskinan adalah ketidaksanggupan untuk mendapatkan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial yang terbatas.
3. Ghose dan Zgiffin, kemiskinan Asia Selatan dan Tenggara berarti kelaparan, kekurangan gizi, ditambah perumahan dan pakaian yang tidak memadai, tingkat pendidikan yang rendah, tidak ada atau sedikit sekali

kesempatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang elementer dan lain-lain.

4. Friedmann, kemiskinan adalah ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial. Basis kekuasaan sosial meliputi (tidak terbatas pada) : modal yang produktif atau *asset* (misalnya tanah, perumahan, peralatan kesehatan, dan lain-lain), sumber-sumber keuangan (*income* dan kredit yang memadai), organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama (partai politik, sindikat, koperasi, dan lain-lain), *network* atau jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang-barang, dan lain-lain, pengetahuan dan keterampilan yang memadai, dan informasi yang berguna untuk memajukan kehidupan.
5. Ala, kemiskinan adalah adanya *gap* atau jurang antar nilai-nilai utama yang diakumulasi dengan pemenuhan kebutuhan akan nilai-nilai tersebut layak.

Lebih jauh, Dillon dan Hermanto (1993) sebagaimana yang dikutip oleh Kasim (2006: 59) mengemukakan, bahwa secara garis besar ada dua cara memandang kemiskinan, sebagian orang berpendapat bahwa kemiskinan adalah suatu proses, sedangkan sebagian lainnya memandang kemiskinan sebagai akibat atau fenomena di dalam masyarakat. Sebagai suatu proses, kemiskinan mencerminkan kegagalan suatu sistem masyarakat dalam mengalokasikan sumber daya dan dana secara

adil kepada anggota masyarakat. Dengan demikian kemiskinan dapat dipandang pula salah satu akibat dari kegagalan kelembagaan pasar (bebas) dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas secara adil kepada seluruh anggota masyarakat, sedangkan pandangan tentang kemiskinan sebagai suatu fenomena atau gejala dari suatu masyarakat, melahirkan konsep kemiskinan absolut, yaitu sebagai ketidakmampuan suatu individu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

2.1.1 Macam – Macam Kemiskinan

Para ahli mengklasifikasikan nya dalam tiga jenis kemiskinan (Bhinadi, 2017:10), yaitu:

1. Kemiskinan alamiah, merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh kualitas sumber daya alam dan sumber daya manusia yang rendah. Kondisi alam dan sumber daya yang rendah membuat peluang produksi juga rendah. Khusus untuk sektor pertanian, kemiskinan yang terjadi lebih diakibatkan kualitas lahan dan iklim yang tidak mendukung aktivitas pertanian. Dari seluruh wilayah di Indonesia, lahan subur justru banyak dijumpai di pulau Jawa. Sedangkan di luar Jawa, sumber daya alam yang subur jumlahnya terbatas, hal ini membuat petani hanya dapat menanam lahan sewaktu ada hujan, kejadian ini menyebabkan hasil produksi hanya dapat diperoleh sekali dalam satu tahun.

2. Kemiskinan kultural, kemiskinan yang terkait erat dengan sikap seseorang atau kelompok dalam masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya, sekalipun ada usaha untuk memperbaiki diri dari pihak lain yang membantunya. Kemiskinan ini dapat pula disebabkan karena sebagian sistem dalam tradisi masyarakat berkontribusi dalam menyebabkan terjadinya kemiskinan masyarakat. Sebagai contoh adalah sistem waris yang mengakibatkan pembagian lahan, sehingga kepemilikan lahan per keluarga semakin lama semakin sempit.
3. Kemiskinan struktural, kemiskinan yang secara langsung maupun tidak disebabkan oleh tatanan kelembagaan atau struktur sosial dalam masyarakat. Tatanan kelembagaan atau struktur sosial disini dapat diartikan sebagai tatanan organisasi maupun aturan permainan yang diterapkan. Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah seringkali menyebabkan sebagian kelompok dalam masyarakat mengalami kemiskinan. Kemiskinan yang terjadi lebih disebabkan keterbatasan bahkan tidak dimilikinya akses kelompok miskin kepada sumber daya-sumber daya pembangunan yang ada. Kemiskinan yang disebabkan oleh struktur sosial yang berlaku ini telah menyebabkan terkurungnya kelompok masyarakat tertentu dalam suasana kemiskinan, yang bahkan telah berlangsung secara turun temurun. Kemiskinan

struktural hanya dapat diatasi jika terjadi suatu proses perubahan struktural dalam masyarakat secara mendasar.

2.1.2 Ukuran Kemiskinan

Kemiskinan mempunyai makna yang luas dan memang tidaklah mudah untuk mengukurnya. Namun, dalam bagian ini akan dijelaskan macam ukuran kemiskinan yang paling umum digunakan (Elly dkk, 2011:796), yaitu:

a. Kemiskinan Absolut

Pada dasarnya, konsep kemiskinan seringkali dikaitkan dengan sebuah pemikiran atas tingkat pendapatan dan kebutuhan. Perkiraan atas tingkat kebutuhan biasanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk dapat hidup secara layak. Jika pendapatan tidak dapat mencapai kebutuhan minimum, maka orang dapat dikatakan miskin. Tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan miskin dan tidak miskin atau sering disebut dengan garis batas kemiskinan. Konsep ini sering disebut dengan kemiskinan absolut. Konsep ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup.

b. Kemiskinan Relatif

Beberapa pakar berpendapat bahwa meskipun pendapatan seseorang sudah mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum, namun ternyata pendapatan orang tersebut masih jauh lebih rendah dari orang yang ada disekitarnya, maka orang tersebut masih berada dalam kategori miskin. Ini terjadi karena kemiskinan lebih banyak ditentukan oleh keadaan sekitarnya, dari lingkungan orang yang bersangkutan. Konsep kemiskinan ini kemudian dikenal dengan konsep kemiskinan relatif.

2.1.3 Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan

Menurut pendapat Bagong Suyanto, ada tiga faktor penyebab terjadinya kemiskinan di pedesaan maupun di perkotaan (Basri, 2002: 98), yaitu:

1. Sempitnya penguasaan dan kepemilikan lahan atau akses produksi lain, ditambah lagi kurangnya ketersediaan modal yang cukup untuk usaha.
2. Karena nilai tukar hasil produksi yang semakin jauh tertinggal dengan hasil produksi lain, termasuk kebutuhan hidup sehari-hari
3. Karena tekanan perangkat kemiskinan dan ketidaktahuan masyarakat, dengan artian mereka terlalu terisolir atau tidak memiliki akses yang cukup untuk memperoleh informasi-informasi yang dibutuhkan. Disamping itu masyarakat secara fisik lemah karena

kurang gizi, mudah terserang penyakit, dan tidak berdaya atau rentan.

Bhinadi (2017:12) dalam bukunya juga menguraikan penyebab kemiskinan bersifat kompleks dan terbagi dalam beberapa dimensi penyebab kemiskinan, yaitu :

1. Kemiskinan yang diakibatkan oleh globalisasi. Globalisasi melahirkan negara pemenang dan negara kalah. Pemenang umumnya adalah negara-negara maju, sedangkan negara-negara berkembang seringkali semakin terpinggirkan oleh persaingan dan pasar bebas yang merupakan persyaratan globalisasi. Karena negara-negara berkembang terpinggirkan maka jumlah kemiskinan di negara-negara berkembang jauh lebih besar dibandingkan negara-negara maju.
2. Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan. Pola pembangunan yang diterapkan telah melahirkan beberapa bentuk kemiskinan, seperti kemiskinan perdesaan, adalah kondisi wilayah desa yang mengalami kemiskinan akibat proses pembangunan yang meminggirkan wilayah perdesaan. Kemiskinan perkotaan, yaitu kondisi kemiskinan yang disebabkan oleh hakikat dan kecepatan pertumbuhan ekonomi, dimana tidak semua kelompok memperoleh keuntungan.
3. Kemiskinan sosial, dimensi ketiga ini melihat pada kondisi sosial masyarakat yang tidak menguntungkan

beberapa kelompok dalam masyarakat. Misalnya kemiskinan yang dialami oleh perempuan, anak-anak, dan kelompok minoritas merupakan kemiskinan yang diakibatkan kondisi sosial yang tidak menguntungkan kelompok tersebut. Kondisi sosial yang dimaksud misalnya bias gender, diskriminasi, atau eksploitasi ekonomi.

4. Kemiskinan konsekuensial. Dimensi keempat ini menekankan faktor-faktor eksternal yang menyebabkan kemiskinan. Faktor-faktor yang dimaksud adalah konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan, dan tingginya jumlah penduduk. Faktor-faktor tersebut lah yang menyebabkan munculnya kemiskinan dalam masyarakat.

2.2 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah dari berbagai usaha pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatan rutin maupun pembangunannya, yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha, dan lain-lain penerimaan milik daerah yang sah (Sasana, 2011). Pendapatan asli daerah juga merupakan alat memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas daerah guna menunjang pelaksanaan pembangunan daerah, serta untuk mengatur, dan

meningkatkan kondisi sosial ekonomi pemakai jasa tersebut (Susanti, Syechalad, dan Hamzah, 2017).

Dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 3, disebutkan bahwa pendapatan asli daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi (Mawarni, Darwanis, dan Abdullah, 2013).

Pada dasarnya, makin banyak kontribusi pendapatan asli daerah terhadap APBD, ini menandakan makin kecilnya keterikatan regional terhadap sentral sebagai efek implementasi otonomi daerah atas azas secara nyata serta bertanggungjawab. Peningkatan kemandirian daerah sangat erat hubungannya dengan kemampuan daerah dalam mengelola pendapatan asli daerahnya. Semakin besar pendapatan asli daerah akan membuat belanja daerah juga meningkat dan akan lebih banyak pengeluaran untuk kesejahteraan masyarakat (Wati dan Fajar, 2017). Sejalan dengan hal tersebut menurut Sasana (2011) menyatakan bahwa, semakin besar kemampuan daerah dalam mengumpulkan pendapatan asli daerah akan semakin longgar

alokasi belanja daerah, sehingga terdapat hubungan yang positif antara pendapatan asli daerah dengan belanja daerah.

Sumber pembiayaan Pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang diatur dalam UU No.33 tahun 2004 , tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah pusat dan daerah, salah satunya adalah pembiayaan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber pada : (a) Pajak daerah; (b) Retribusi daerah; (c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (d) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Hidayah dan Setiyawati, 2014).

2.2.1 Pajak Daerah

Dalam keuangan Pemerintah, pendapatan yang bersumber dari penerimaan perpajakan akan digunakan untuk mendanai belanja Pemerintah termasuk di dalamnya belanja modal. Sesuai dengan karakter nya, belanja modal dalam keuangan Pemerintah diterjemahkan sebagai belanja yang dilakukan dalam rangka pemupukan modal dalam aset fisik, seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, serta dalam bentuk fisik lainnya (Ramlan, Darwanis dan Abdullah, 2016).

Pajak daerah merupakan salah satu bentuk pendapatan asli daerah. Menurut UU No.34 tahun 2000 menyebutkan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilaksanakan oleh orang

pribadi/badan kepada daerah tanpa adanya imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Novalistia, 2016).

Dewan Perwakilan rakyat dewasa ini menetapkan pembagian jenis pajak pada pajak daerah provinsi dan Kabupaten/Kota yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut (Anggoro, 2017:115).

Jenis pajak Provinsi terdiri atas:

1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak Air Permukaan
5. Pajak Rokok

Jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Pajak daerah merupakan salah satu pos terpenting dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan dapat menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Pemungutan pajak daerah erat kaitannya dengan pembangunan ekonomi daerah, artinya keberhasilan pembangunan ekonomi akan mampu menaikkan penarikan pajak yang akan dilakukan oleh Pemerintah (Handayani, Abdullah dan Fahlevi, 2015).

2.2.2 Retribusi Daerah

Menurut Koswara retribusi daerah adalah imbalan atau manfaat yang diperoleh secara langsung seseorang atau badan atas jasa layanan, pekerjaan, pemakaian barang, atau izin yang diberikan oleh Pemerintah daerah (Ramlan dkk, 2016), sedangkan Anggoro (2017) mengemukakan bahwa retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap orang yang menggunakan jasa yang disediakan oleh pemerintah dengan adanya kontra prestasi secara langsung yang diterima masyarakat pengguna jasa yang dimaksud.

Ersita dan Elim (2016) menguraikan macam-macam retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Retribusi Daerah yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Retribusi jasa umum

Jenis-jenis retribusi jasa umum terdiri dari:

- a. Retribusi pelayanan kesehatan
- b. Retribusi pelayanan persampahan
- c. Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan akte catatan sipil
- d. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
- e. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
- f. Retribusi pelayanan pasar
- g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- h. Retribusi pengujian alat pemadam kebakaran
- i. Retribusi pengujian kapal perikanan

2. Retribusi jasa usaha

Jenis-jenis retribusi jasa usaha terdiri dari:

- a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- b. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan
- c. Retribusi tempat pelelangan
- d. Retribusi terminal
- e. Retribusi tempat khusus parkir
- f. Retribusi tempat penginapan/persinggahan/villa
- g. Retribusi penyedotan kakus
- h. Retribusi rumah potong hewan
- i. Retribusi pelayanan pelabuhan kapal
- j. Retribusi tempat rekreasi dan olah raga
- k. Retribusi penyeberangan di atas air
- l. Retribusi pengolahan limbah cair
- m. Retribusi penjualan produksi usaha daerah

3. Retribusi perizinan tertentu

Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu terdiri dari:

- a. Retribusi izin mendirikan bangunan
- b. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
- c. Retribusi izin gangguan
- d. Retribusi izin trayek

Semakin besar penerimaan retribusi daerah dalam PAD maka semakin besar pula kembali dana yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana publik yang kembali berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat dan seterusnya hingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah itu kembali (Ramlan dkk, 2016).

2.2.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Halim (2008:98) dalam bukunya menyatakan bahwa hasil kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

1. Bagian laba atas pernyataan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD
2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN

3. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

2.2.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik Pemerintah daerah. Rekening ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah selain yang disebut di atas. Walaupun demikian penerimaan daerah sangat tergantung pada potensi daerah itu sendiri. Artinya semakin besar potensi sumber lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, maka semakin besar pula penerimaan daerah. Peningkatan PAD yang berasal dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah diharapkan dapat meningkatkan investasi belanja modal Pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik (Ramlan dkk, 2016).

Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2013 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana yang dikutip oleh Novalistia (2016), lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri dari :

1. Hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan
2. Hasil pemanfaatan dan pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
3. Jasa giro
4. Pendapatan bunga deposito
5. Penerimaan atau tuntutan gantirugi
6. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah

7. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
8. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
9. Pendapatan denda pajak dan retribusi
10. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
11. Pendapatan dari pengembalian
12. Fasilitas sosial dan fasilitas umum
13. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
14. Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

2.3 Dana Perimbangan

Berdasarkan UU No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah dan pemerintah daerah. Dana perimbangan terdiri dari, 1) Dana alokasi umum, 2) Dana alokasi khusus, 3) Dana bagi hasil (Agung Sandewi, 2014).

Kemandirian keuangan Pemerintah daerah merupakan kebalikan dari besarnya rasio penerimaan transfer di dalam pemenuhan pembelanjaan Pemerintahan. Belanja daerah sangat dipengaruhi oleh transfer dari Pemerintah pusat. Perimbangan keuangan dengan dana transfer Pemerintah pusat kepada

Pemerintah daerah menjadi insentif bagi pemerintah daerah untuk membiayai belanja Pemerintah daerah. Namun demikian, semakin besar transfer dana perimbangan yang diterima dari Pemerintah pusat akan memperlihatkan semakin kuat Pemerintah daerah tergantung kepada Pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya sehingga akan membuat kinerja keuangan daerah menurun (Basri, Andirfa, dan Majid, 2016).

2.3.1 Dana Alokasi Umum

UU Nomor 33 tahun 2004 menyebutkan Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah (Hidayah dan Setiyawati, 2014).

Dana alokasi umum suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*). Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhan fiskalnya kecil, akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil. Sebaliknya daerah yang potensi fiskal

nya kecil, namun kebutuhan fiskal nya besar akan memperoleh alokasi DAU relatif besar, agar pelayanan untuk kebutuhan dasar dapat terpenuhi. Konsep dasar formulasi dana alokasi umum sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No.25 tahun 1999 itu secara implisit merupakan penjabaran dari teori *governmental transfer* yang berbasis pada konsepsi *fiscal gap*. Dengan konsepsi *fiscal gap* nantinya kesenjangan fiskal yang merupakan selisih negatif antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal dianggap sebagai kebutuhan yang harus ditutup melalui transfer Pemerintah pusat (Mawarni dkk, 2013).

Dana alokasi umum bersifat *block grant* yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan layanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Kebutuhan fiskal diukur dengan menggunakan variabel jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan Kontruksi (IKK), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sedangkan kapasitas fiskal diukur berdasarkan PAD dan DBH. Alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji pegawai negeri sipil daerah (Badrudin dan Manek, 2016).

Dana alokasi umum merupakan komponen dasar dalam dana perimbangan dan perannya sangat strategis dalam menciptakan pemerataan dan keadilan antar daerah. Dana alokasi umum digunakan untuk mengurangi ketimpangan dalam

kebutuhan pembiayaan dan penguasaan pajak antara pusat dan daerah, proporsi yang diberikan kepada daerah minimal 26% (dua puluh enam persen) dari penerimaan dalam negeri netto. H.A.W Wijaya mengungkapkan bahwa dana alokasi umum menekankan aspek pemerataan dan keadilan dimana formula dan perhitungannya ditentukan oleh Undang-Undang. Penggunaan dana alokasi umum ditetapkan oleh daerah. Penggunaan dana alokasi umum dan penerimaan umum lainnya dalam APBD harus tetap pada kerangka pencapaian tujuan pemberian otonomi kepada daerah yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, seperti pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan (Agung Sandewi, 2014).

Mengacu kepada PP No. 104 Tahun 2000 dalam (Salindeho, 2016) tentang dana perimbangan, tujuan DAU terutama adalah untuk (a) *horizontal equity*, tujuannya merupakan kepentingan Pemerintah pusat dalam rangka melaksanakan distribusi pendapatan secara adil dan merata agar tidak terjadi kesenjangan antar daerah dan (b) *sufficiency*, merupakan kepentingan daerah dalam mencukupi *fiscal gap*. *Sufficiency* (kecukupan) dipengaruhi beberapa faktor, yaitu : kewenangan, beban, dan Standar Pelayanan Minimum (SPM).

2.3.2 Dana Alokasi Khusus

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah menjelaskan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana transfer dari Pemerintah pusat kepada Pemerintah daerah yang digunakan untuk menjalankan pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik di Kabupaten/Kota. Dana Alokasi Khusus (DAK) dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas Nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. DAK sepenuhnya digunakan untuk belanja modal untuk peningkatan fasilitas publik dengan kata lain tidak ada bagian DAK yang digunakan untuk biaya operasional pembangunan seperti biaya perjalanan dinas dan sebagainya (Harahap, 2017).

Wijaya (2004:139) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan daerah tertentu adalah daerah yang mempunyai kebutuhan bersifat khusus. Pengalokasian DAK memperhatikan ketersediaan dana dalam APBN berarti bahwa besaran dana alokasi khusus tidak dapat dipastikan setiap tahunnya. DAK digunakan khusus untuk membiayai investasi pengadaan dan atau peningkatan dan atau perbaikan prasarana dan sarana fisik

dengan umur ekonomis yang panjang. Dalam keadaan tertentu DAK dapat membantu biaya pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana tertentu untuk periode terbatas, tidak melebihi 3 bulan.

Kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan secara umum dengan rumus adalah kebutuhan yang bersifat khusus yang tidak sama dengan kebutuhan daerah lain, misalnya kebutuhan kawasan transmigrasi dan kebutuhan beberapa jenis investasi/prasarana baru, pembangunan jalan di kawasan terpencil, saluran irigasi primer dan saluran drainase primer. Kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas Nasional termasuk antara lain, proyek yang dibiayai donor pembiayaan reboisasi oleh daerah dan proyek-proyek kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. DAK dialokasikan kepada daerah tertentu berdasarkan usulan kegiatan dan sumber-sumber pembiayaan yang diajukan kepada menteri Teknis oleh daerah tersebut dapat berupa dokumen program rencana suatu proyek atau kegiatan tertentu atau dapat dokumen program rencana pengeluaran tahunan untuk sektor-sektor serta sumber-sumber pembiayaannya. Bentuk usulan daerah tersebut berpedoman pada kebijakan instansi teknis terkait, kecuali usulan tentang proyek/kegiatan reboisasi yang dibiayai dari bagian dana reboisasi dari daerah penghasil (Wijaya, 2004:140-141).

Salindeho (2016) menyebutkan bahwa kriteria pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK), yaitu :

1. Kriteria umum, dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang tercermin dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja PNSD
2. Kriteria khusus, dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah
3. Kriteria teknis, yang disusun berdasarkan indikator-indikator yang dapat menggambarkan kondisi sarana dan prasarana, serta pencapaian teknis pelaksanaan kegiatan DAK di daerah

2.3.3 Dana Bagi Hasil

Berdasarkan UU No. 33 tahun 2004 tentang dana perimbangan antara Pemerintah pusat dan daerah sebagaimana dikutip oleh Susanti dan fahlevi (2016), menjelaskan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang kemudian dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH yang ditransfer Pemerintah pusat kepada Pemerintah daerah terdiri dari dua jenis yaitu (a). Dana bagi hasil pajak dan (b). Dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam). Dana Bagi Hasil (DBH) yang berasal dari sumber daya alam yaitu :

1. Kehutanan
2. Pertambangan umum
3. Perikanan
4. Pertambangan minyak bumi
5. Pertambangan gas bumi
6. Pertambangan minyak bumi

Berdasarkan Per Mendagri No. 21 tahun 2011 perubahan kedua atas Per Mendagri No. 13 tahun 2006, Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber pada pajak terdiri dari :

- a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- b. Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- c. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 dan pasal 26 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh pasal 21

1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Novalistia (2016) menyebutkan Penerimaan Negara dari PBB dibagi dengan timbangan 10% (sepuluh persen) untuk Pemerintah pusat dan 90% untuk Pemerintah daerah. Bagi hasil PBB untuk daerah yang sebesar 90% (sembilan puluh persen) dibagi dengan rincian sebagai berikut :

- a) 16,2 % (enam belas dua persepuluh persen) untuk Provinsi yang bersangkutan
- b) 64,8% (enam puluh empat delapan persepuluh persen) untuk Kabupaten/Kota yang bersangkutan
- c) 9% (sembilan persen) untuk biaya pemungutan

Bagian Pemerintah sebesar 10% (sepuluh persen) dialokasikan oleh Pemerintah kepada seluruh Kabupaten dan Kota dengan rincian sebagai berikut :

- a) 6,5% (enam lima persepuluh persen) dibagikan sebagai insentif kepada Kabupaten dan Kota
- b) 3,5% (tiga lima persepuluh persen) dibagikan sebagai insentif kepada Kabupaten dan Kota yang realisasi penerimaan PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan pada tahun anggaran sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan.

2. Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB)

BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pembagian BPHTB adalah sebesar 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah pusat dan sebesar 80% (delapan puluh persen) untuk Pemerintah daerah dengan rincian sebagai berikut:

- 1) 16% (enam belas persen) untuk Provinsi yang bersangkutan
- 2) 64% (enam empat persen) untuk daerah Kabupaten/Kota penghasil

Dalam rangka pemerataan kemampuan keuangan daerah, sebesar 20% (dua puluh persen) bagian Pemerintah pusat dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk Kabupaten dan Kota (Novalistia, 2016)

3. Dana Bagi Hasil Pajak Orang Pribadi

Pajak penghasilan pasal 25 dan 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, adalah pajak terhutang oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri (berdasarkan ketentuan pasal 25 dan pasal 29 Undang-Undang Pajak Penghasilan) dan Pajak Penghasilan pasal 21 adalah pajak penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan wajib pajak orang pribadi berdasarkan ketentuan pasal 21 Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan. Penerimaan atas pajak penghasilan tersebut dibagikan kepada daerah sebesar 20% (dua puluh persen) dengan perincian 8% untuk provinsi yang bersangkutan dan 12% untuk kabupaten yang bersangkutan (Novalistia, 2016).

2.4 Zakat

Kata zakat ialah bentuk masdar yang berasal dari kata *zaka-yazku-zaka'an* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik, sebagaimana disebutkan dalam *Al-Mu'jam Al-Wasith*. Zakat secara bahasa artinya adalah berkah, tumbuh, suci, baik dan bersihnya sesuatu, sedangkan zakat secara syara' adalah hitungan tertentu dari harta dan sejenisnya dimana syara' mewajibkan untuk mengeluarkannya kepada orang-orang fakir dan lainnya dengan syarat-syarat khusus. Imam Asy Syarkhasyi al Hanafi dalam kitabnya *Al Mabsuth* mengatakan bahwa dari segi bahasa zakat adalah tumbuh dan bertambah. Disebut zakat,

karna sesungguhnya ia menjadi sebab bertambahnya harta dimana Allah ta'ala menggantinya di dunia dan pahala di akhirat (Arifin, 2016:3-4). Sebagaimana firman-Nya :

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

“Dan barang apa saja yang kamu nafkah kan, maka Allah akan mengganti nya” (Q.S Saba’ [34] :39)

Mengutip pendapat Sulaiman Rasjid bahwa zakat secara terminologi adalah kadar harta tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat. Setiap Muslim diwajibkan mengeluarkan zakat apabila telah cukup memenuhi syarat wajib zakat yang kemudian diserahkan kepada mustahiq (Ridlo, 2014).

2.4.1 Dalil-Dalil Zakat

Zakat merupakan konsep dalam ajaran Islam yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Rasul bahwa harta kekayaan yang dipunyai seseorang adalah amanat dari Allah dan berfungsi sosial. Dengan demikian, zakat adalah suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT. Ini dapat dilihat dari dalil-dalil, baik yang terdapat dalam Al-Quran maupun yang terdapat dalam kitab-kitab hadits antara lain sebagai berikut :

1. Firman Allah SWT,

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ

“Ambil lah dari harta mereka sedekah/zakat, untuk membersihkan mereka serta menghapuskan kesalahan mereka” (QS. At-Taubah [9] : 103)

2. Firman Allah SWT,

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

“Dirikan lah shalat dan bayar lah zakat harta mu” (QS. An-Nisa [4] : 77)

3. Hadis Nabi SAW

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

“Islam didirikan atas lima sendi, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji ke baitullah dan berpuasa di bulan Ramadhan” (HR. Muslim).

Berdasarkan dalil-dalil di atas, terutama yang menempatkan kata zakat yang mengiringi kata shalat, maka dapat ditentukan bahwa status zakat sebagai ibadah wajib yang

sama pentingnya seperti shalat. Ini berarti bahwa zakat itu salah satu sendi satu tiang utama dari bangunan Islam. Demikian zakat sebagai rukun Islam, meninggalkan zakat bagi yang mampu, batal lah status orang sebagai penganut ajaran Islam yang baik (Sari, 2006:11-12).

2.4.2 Syarat dan Rukun Zakat

Zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah, menurut jumhur Ulama syarat wajib zakat terdiri dari:

- 1) Islam
- 2) Merdeka
- 3) Baligh dan Berakal
- 4) Harta yang dikeluarkan adalah yang wajib dizakati
- 5) Harta yang dizakati telah mencapai nisab atau senilai dengannya
- 6) Harta yang dizakati adalah milik penuh
- 7) Kepemilikan harta telah mencapai haul (setahun)
- 8) Harta tersebut bukan termasuk hasil utang
- 9) Harta yang dizakati melebihi kebutuhan pokok

Adapun diantara syarat sah zakat ialah sebagai berikut.

- 1) Niat
- 2) Tamlik (memindahkan kepemilikan kepada penerimanya)

Rukun zakat adalah mengeluarkan sebagian dari nisab (harta) yang dengan melepaskan kepemilikan terhadap nya, menjadikan nya sebagai milik orang fakir dan menyerahkan kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakil nya

yakni imam atau orang yang bertugas memungut zakat (Ar Rahman, 2003:97).

2.4.3 Jenis-Jenis Harta Zakat

Sari (2006:18) menguraikan bahwa harta yang wajib dizakati sebagai berikut:

1. Kekayaan moneter, industri, perhiasan simpanan, piutang yang diharapkan akan dibayar, dan harta yang diperoleh (*mal mustafad*).
2. Barang-barang dagangan, industri, dan yang serupa dengannya.
3. Hasil-hasil pertanian, buah-buahan, dan yang serupa dengannya.
4. Binatang ternak dan buah-buahan yang serupa dengannya.
5. Binatang-binatang ternak, unta, sapi, kambing, dan yang serupa dengannya.
6. Hasil penyewa pokok-pokok yang tetap dan yang serupa dengannya.
7. Gaji dan penghasilan dari kerja lepas (*freelance*).
8. Harta karun (*rikaz*), barang tambang, dan kekayaan laut.

2.4.4 Macam-macam Zakat

1. Zakat fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang sebab diwajibkannya adalah futur (berbuka puasa) pada bulan Ramadhan. Fitri berarti berbuka puasa, yang dimaksudkan disini ialah berbuka puasa di waktu matahari terbenam pada hari terakhir bulan Ramadhan. Berakhirnya bulan Ramadhan itu merupakan sebab lahiriah pada kewajiban zakat tersebut sehingga diberi nama zakat fitrah atau

sedekah fitri. Demikian pula nama hari raya fitri, hari yang berkenaan dengan takbir, tahlil, dan tahmid sebagai tanda kemenangan. Selain istilah “zakat fitri” maka yang lebih populer di masyarakat adalah zakat fitrah. Fitrah berarti ciptaan, sifat awal, bakat, perasaan keagamaan dan perangai (Ja’far, 2007:60-61), sedangkan zakat fitrah adalah zakat yang berfungsi mengembalikan manusia Muslim kepada fitrah nya, dengan menyucikan jiwa mereka dari kotoran-kotoran (dosa-dosa) yang disebabkan oleh pengaruh pergaulan dan sebagainya sehingga manusia itu menyimpang dari fitrah nya (Sari, 2006:21).

2. Zakat Harta/Zakat Mal

Zakat harta/zakat maal ialah zakat yang dikenakan atas harta (maal) yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan syarat-syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Maal berasal dari bahasa Arab ”maal” yang artinya harta benda. Zakat maal adalah zakat yang dikeluarkan atas harta benda yang kita miliki. Allah memerintahkan kepada kita untuk berbagi dengan orang yang membutuhkan karena sesungguhnya didalam harta kita terdapat suatu bagian untuk orang lain yang membutuhkan (Sari, 2006 :24).

Ash-shiddiqi (2009: 18) berpendapat bahwa ketika seseorang memiliki kelebihan harta dan orang tersebut tidak mengeluarkan zakatnya maka orang tersebut menyimpan bagian orang lain didalam hartanya. Tujuan saja hal ini dapat menjadi salah satu faktor yang dapat menghilangkan keberkahan atas

harta yang dimilikinya dan tidak tersucikannya harta. Harta benda yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya jika telah memenuhi nisab dan haul, meliputi : hewan ternak, emas, dan perak, hasil pertanian, peniagaan, perdagangan, zakat profesi/pekerjaan, hasil tambang (*ma'din*) dan barang temuan (*rikaz*).

2.5 Penelitian Terkait

Amalia dan Mahalli (2012) melakukan penelitian dengan judul Potensi dan Peranan Zakat dalam Mengentaskan kemiskinan di Kota Medan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 10 kecamatan di Kota Medan dengan metode analisis *Skala Likert*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara pengaruh zakat dengan pengentasan kemiskinan.

Penelitian mengenai zakat juga dilakukan oleh Damanhur dan Nurainiah (2016) dengan judul Analisis Pengaruh Bantuan Zakat terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Aceh Utara. Penelitian ini menggunakan data dari Baitul Mal Aceh Utara dengan rentang waktu 2007 sampai dengan 2012 dan mengambil sampel sebanyak 20 orang responden. Adapun metode yang dipilih yakni analisis linear sederhana. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa zakat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Aceh utara.

Manek dan Badrudin, di tahun yang sama juga melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Penelitian ini menggunakan sampel 21 kabupaten/kota di Provinsi NTT dengan jenis data cross section dan rentang waktu sejak tahun 2007 sampai dengan 2016. Metode analisis yang digunakan ialah WarpPLS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kemiskinan, dana perimbangan tidak memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi tidak memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kemiskinan.

Paat dkk (2017) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Dampaknya Terhadap Kemiskinan di Kota Bitung. Penelitian nilai menggunakan data yang diperoleh dari Dispenda Kota Bitung dengan rentang waktu data dari tahun 2004 sampai dengan 2015. Adapun metode yang digunakan ialah analisis jalur (*path analisis*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi tetapi tidak berpengaruh signifikan secara statistik. Pendapatan asli daerah dan

pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan dan signifikan secara statistik. Dana perimbangan berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di Kota Bitung tetapi tidak signifikan secara statistik.

Adapun hasil deskripsi penelitian dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Penelitian Terkait

No	Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian		Perbedaan
1.	Amalia dan Mahalli (2012)	Sampel: 10 Kecamatan di Kota Medan Variabel dependen: Kemiskinan Variabel independen: zakat Metode Analisis: Skala Likert	Peneliti menemukan: Zakat berpengaruh signifikan terhadap pengentasan kemiskinan	Variabel dependen: Kemiskinan Variabel independen: Zakat	Metode Analisis: Skala Likert

Tabel 2.1 – Lanjutan

No	Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
2.	Damanhur dan Nurainiah (2016)	Sampel: 20 orang responden yang merupakan mustahiq zakat pada periode 2007-2012 Variabel dependen: Pendapatan mustahiq Variabel independen: Jumlah zakat	Peneliti menemukan: Bahwa zakat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat	Variabel independen: Zakat	Variabel dependen: Pendapatan mustahiq Metode analisis: Regresi linier sederhana
3.	Marianus Manek dan Rudy Badrudin (2016)	Sampel: 21 Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada periode 2007-2016 Variabel Dependen: Kemiskinan Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan Pertumbuhan Ekonomi Metode Analisis Analisis SEM berbasis varians yaitu WarpPLS	Peneliti menemukan: PAD memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan dana perimbangan dan pertumbuhan ekonomi tidak memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kemiskinan.	Variabel dependen: Kemiskinan Variabel independen: Pendapatan Asli Daerah dan Dana perimbangan	Variabel independen: Pertumbuhan ekonomi Metode Analisis: WarpPLS

Tabel 2.1 – Lanjutan

No	Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
4	Paat dkk (2017)	Sampel: Kota Bitung pada periode 2004-2015 Variable dependen Tingkat Kemiskinan Variabel independen: Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan Pertumbuhan Ekonomi Metode analisis: Analisis jalur (path analysis)	Peneliti menemukan: PAD dan Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan, dana perimbangan berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan	Variabel dependen: Kemiskinan Variabel independen: Pendapatan Asli Daerah dan Dana perimbangan	Variabel independen: Pertumbuhan ekonomi Metode Analisis: Analisis jalur (path analysis)

Sumber: data diolah (2019)

2.6 Keterkaitan Antar Variabel

1. Hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Tingkat Kemiskinan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah dari berbagai usaha pemerintah daerah. Kemampuan daerah yang mampu mengoptimalkan dan mengelola pendapatannya sendiri akan mampu meningkatkan berbagai potensi di sektor-sektor yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, dimana hal ini dapat menekan tingkat pengangguran dan mengurangi jumlah kemiskinan di daerah itu sendiri (Setiyawati, 2007). Penelitian yang dilakukan Manek, Badrudin

(2016) dan Paat dkk (2017) juga menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan, yang dapat diartikan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mampu menurunkan tingkat kemiskinan.

Berbeda dengan Frans, Rahayu dan Mahardika (2017) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini karena PAD merupakan salah satu pendapatan daerah, dan dialokasikan pemerintah daerah untuk membiayai kegiatannya seperti belanja daerah, pembangunan daerah, dan melengkapi sarana dan prasarana daerah guna memenuhi pelayanan public yang menjadi kewajiban pemerintah. Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh Iswara dan Indrajaya (2014) yang dalam penelitiannya menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

2. Hubungan Dana Perimbangan dengan Tingkat Kemiskinan

Jolianis (2016) menyatakan bahwa dana perimbangan melalui DAU memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan, dikarenakan program-program yang dirancang oleh pemerintah daerah dibiayai dengan dana alokasi umum sehingga dengan adanya dana alokasi umum yang merupakan bagian dari dana

perimbangan mampu mendukung keberhasilan program pengentasan kemiskinan. Hal ini juga selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Paulus, Koleangan dan Engka (2017) menunjukkan Dana Perimbangan memiliki hubungan negatif terhadap tingkat kemiskinan melalui DAK dan DAU. Sehingga dapat diartikan kenaikan jumlah dana perimbangan mampu menurunkan tingkat kemiskinan.

Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Paat dkk (2017), Manek dan Badrudin (2016) bahwasannya Dana Perimbangan memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan. Semakin besar transfer dana perimbangan yang diterima dari Pemerintah pusat akan memperlihatkan semakin kuat Pemerintah daerah tergantung kepada Pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerah nya sehingga akan membuat kinerja keuangan daerah menurun (Basri, Andirfa, dan Majid, 2016).

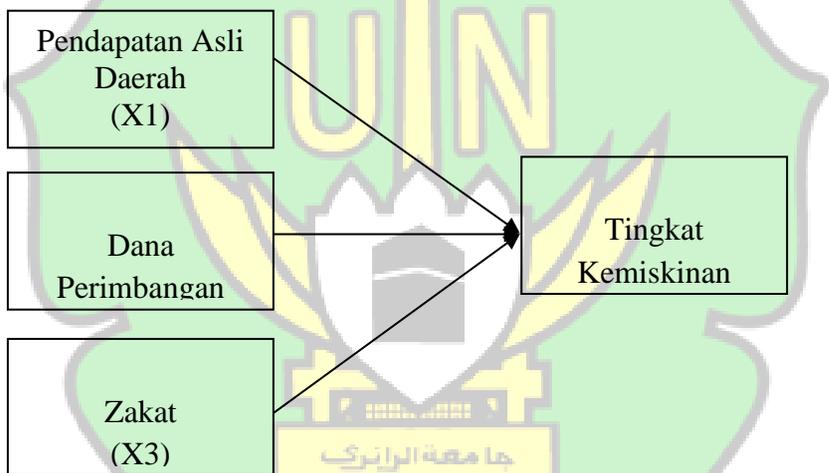
3. Hubungan Penerimaan Zakat dengan Tingkat Kemiskinan

Zakat dianggap mampu dalam pengentasan kemiskinan, karena zakat merupakan sarana yang dilegalkan agama dalam pembentukan modal. Pendayagunaan dan pengelolaan zakat yang optimal akan mampu membantu masyarakat jika pendistribusiannya dilakukan dengan tepat dan memperhatikan golongan yang menerima agar pendayagunaan tepat sasaran

(Amalia dan Mahalli, 2012). Hal ini juga diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Beik (2009) dan Pratama (2015) menjelaskan bahwa zakat berpengaruh signifikan terhadap pengentasan kemiskinan. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin besar jumlah zakat maka akan kemiskinan akan mengalami penurunan.

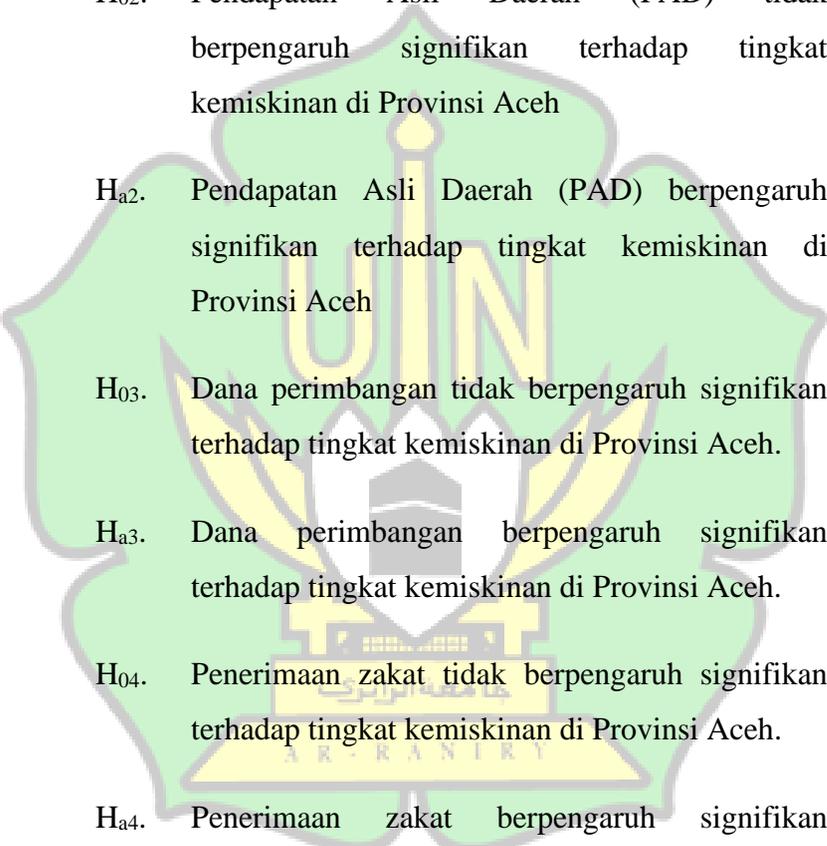
2.7 Kerangka Berfikir

Berikut adalah kerangka pikir yang akan menjadi acuan bagi penulis dalam melakukan penelitian:



2.8 Hipotesis

H₀₁. Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan penerimaan zakat secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh.

- 
- H_{a1}. Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan penerimaan zakat secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh.
- H₀₂. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh
- H_{a2}. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh
- H₀₃. Dana perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh.
- H_{a3}. Dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh.
- H₀₄. Penerimaan zakat tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh.
- H_{a4}. Penerimaan zakat berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian kuantitatif merupakan metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Variabel-variabel ini diukur (biasanya dengan instrumen penelitian) sehingga data yang terdiri dari angka-angka dapat dianalisis berdasarkan prosedur statistik (Noor, 2017:38). Penelitian ini melalui pendekatan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dilakukan dengan cara mempelajari literatur-literatur yang relevan dengan masalah dan mengambil data dari Badan Pusat Statistik yang berupa data sekunder.

Berdasarkan tujuannya penelitian ini merupakan penelitian explanatory atau confirmatory. Penelitian explanatory (penjelasan) merupakan penelitian yang menyoroti hubungan antar variabel dengan menggunakan kerangka pemikiran terlebih dahulu, kemudian dirumuskan dalam bentuk hipotesis (Suryana, 2010:15).

3.2 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk jadi dan telah diolah oleh pihak lain, yang biasanya dalam bentuk publikasi (Hermawan, 2005:168). Sampel yang

digunakan dalam penelitian ini adalah 23 Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. Data tersebut bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan persentase kemiskinan dalam bentuk data panel. Data panel merupakan data yang terdiri dari kombinasi data *time series* dan data *cross-section*. Dengan kata lain, data panel terdiri dari data beberapa objek dan meliputi beberapa waktu (Nuryanto dan Pambuko, 2018:6). Adapun objek dalam penelitian ini adalah 23 Kabupaten/Kota dengan rentang waktu dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 dengan jumlah data sebanyak 115 data.

3.3 Operasional Variabel

Sugiyono (2013:31) menjelaskan operasional adalah penentuan konstruk atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Sebagai panduan untuk melakukan penelitian dan dalam rangka pengujian hipotesis yang diajukan, maka perlu dikemukakan definisi operasional variabel yang digunakan. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen (terikat) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2013:39). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kemiskinan (Y). Variabel independen dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana perimbangan (X2), dan Zakat (X3).

1. Kemiskinan (Y)

Kemiskinan adalah taraf hidup yang rendah atau suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kemiskinan dalam penelitian ini digambarkan menggunakan jumlah penduduk miskin yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Variabel yang digunakan adalah data persentase kemiskinan tahun 2013-2017 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

2. Pendapatan Asli Daerah (X1)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah dari berbagai usaha pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatan rutin maupun pembangunannya. Pendapatan Asli Daerah dalam penelitian ini digambarkan menggunakan jumlah pemasukan daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Variabel pendapatan asli daerah dalam penelitian ini dinyatakan dalam jutaan rupiah tahun 2013-2017 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

3. Dana Perimbangan (X2)

Dana perimbangan dalam penelitian ini digambarkan jumlah pemasukan daerah yang merupakan pembiayaan dari pemerintah pusat. Dana perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Variabel dana perimbangan dalam penelitian ini dinyatakan dalam jutaan rupiah yang di peroleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun 2013-2017.

4. Zakat (X3)

Zakat secara syara' adalah hitungan tertentu dari harta dan sejenisnya dimana syara' mewajibkan untuk mengeluarkannya kepada orang-orang fakir dan lainnya dengan syarat-syarat khusus. Zakat dalam penelitian ini digambarkan jumlah penerimaan zakat dari muzakki yang dikelola oleh Lembaga pemerintah. Variabel zakat dalam penelitian ini dinyatakan dalam jutaan rupiah yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun 2013-2017.

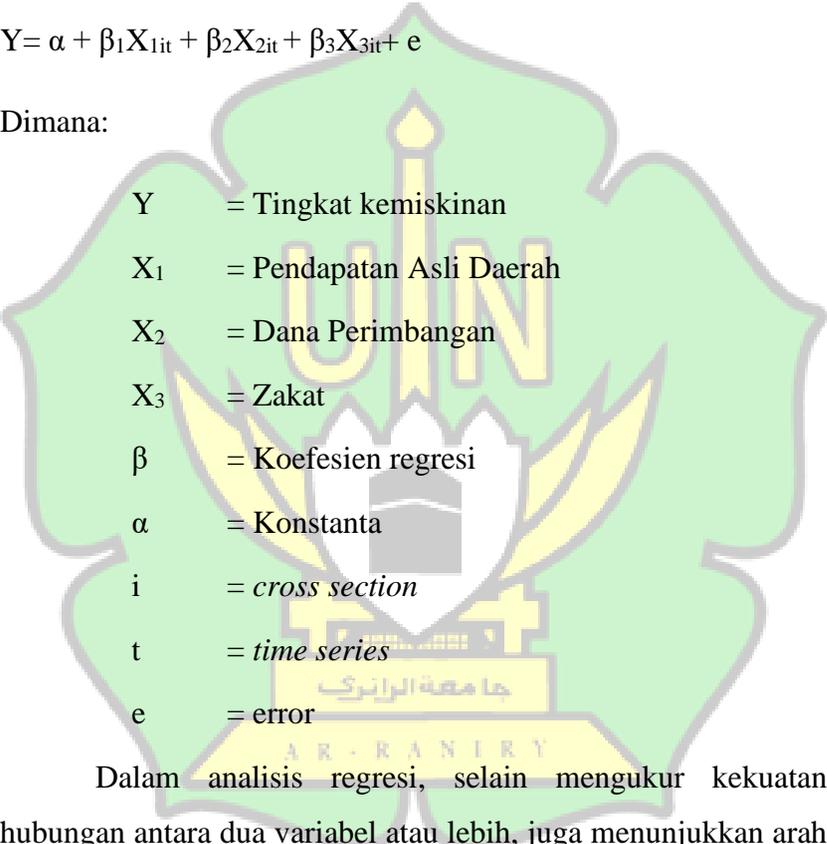
3.4 Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yang merupakan metode untuk menguji teori-toeri tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Variabel-variabel ini diukur (biasanya dengan instrumen penelitian) sehingga data yang terdiri dari angka-angka dapat dianalisis berdasarkan prosedur statistik (Noor, 2017:38). Metode penelitian yang

digunakan ialah analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda adalah analisis mengenai beberapa variabel independen dengan satu variabel dependen. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel maka model regresinya adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + e$$

Dimana:



Y	=	Tingkat kemiskinan
X ₁	=	Pendapatan Asli Daerah
X ₂	=	Dana Perimbangan
X ₃	=	Zakat
β	=	Koefesien regresi
α	=	Konstanta
i	=	<i>cross section</i>
t	=	<i>time series</i>
e	=	error

Dalam analisis regresi, selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen (Priadana dan Muis, 2009:185). Sehingga dapat membedakan antara variabel independen dengan variabel dependen tersebut. Dimana dalam penelitian ini Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan zakat sebagai variabel independen akan

dianalisis pengaruhnya terhadap kemiskinan yang merupakan variabel dependen.

Beberapa langkah yang dilakukan dalam analisis regresi linier masing-masing akan dijelaskan dibawah ini :

3.5 Estimasi Model Data Panel

1. Koefisien tetap antar waktu dan individu (*Common Effect*): *Ordinary Least Square*

Teknik ini tidak ubahnya dengan membuat regresi dengan data *cross section* atau *time series*. Akan tetapi untuk data panel, sebelum membuat regresi harus menggabungkan data *cross section* dengan data *time series* (*pooldata*). Kemudian data gabungan ini diperlakukan sebagai suatu kesatuan pengamatan untuk mengestimasi model dengan metode OLS. Metode ini dikenal dengan estimasi *Common Effect* (Munandar, 2017).

Akan tetapi menurut Winarno (2011: 214) kelemahan asumsi ini adalah ketidaksesuaian model dengan keadaan yang sesungguhnya. Kondisi tiap objek saling berbeda, bahkan satu objek pada suatu waktu akan sangat berbeda pada kondisi objek tersebut pada waktu yang lain.

2. Model Efek Tetap (*Fixed Effect Model*)

Model ini dapat menunjukkan perbedaan konstan antar objek, meskipun dengan koefisien regresor yang sama. Model

ini juga memperhitungkan kemungkinan bahwa peneliti menghadapi masalah *omitted variables* yang mungkin membawa perubahan pada *intercept time series* atau *cross section*. Model FEM dengan efek tetap maksudnya adalah bahwa suatu objek, memiliki konstan yang tetap besarnya untuk berbagai periode waktu. Demikian pula dengan koefisien regresinya tetap dari waktu ke waktu. Untuk membedakan satu objek dengan objek lainnya digunakan *dummy variable*, oleh karena itu model ini dikenal juga dengan *Least Squares Dummy variables* (LSDV) (Winarno, 2011: 214).

3. Model Efek Random (*Random Effect*)

Munandar (2017) mengatakan bila pada model efek tetap, perbedaan individu dan atau waktu dicerminkan lewat *intercept*, maka pada model efek random perbedaan tersebut diakomodasi lewat error. Teknik ini juga memperhitungkan bahwa error mungkin berkorelasi sepanjang *time series* dan *cross section*. Namun terdapat satu syarat untuk menganalisis dengan menggunakan efek random, yaitu objek data silang harus lebih besar dari banyaknya koefisien.

3.6 Pemilihan Model Regresi Data Panel

3.6.1 Uji Chow

Menurut Munandar (2017) untuk mengetahui model mana yang lebih baik dalam pengujian data panel, bisa dilakukan dengan dengan menambahkan variabel *dummy*

sehingga dapat diketahui bahwa intersepnya berbeda dapat diuji dengan uji statistik F. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah teknik regresi data panel dengan metode *Fixed Effect* lebih baik dari regresi model data panel tanpa variabel *dummy* atau metode *Common Effect*.

Hipotesis pada uji ini adalah bahwa intercept sama, atau dengan kata lain model yang tepat untuk regresi data panel adalah *Common Effect*, dan hipotesis alternatifnya adalah intersep tidak sama atau model yang tepat untuk regresi data panel adalah *Fixed Effect*. Nilai statistik F hitung akan mengikuti distribusi statistik F dengan derajat kebebasan (*degree of freedom*) sebanyak m untuk numerator dan sebanyak $n-k$ untuk denominator. m merupakan jumlah restriksi atau pembatasan di dalam model tanpa variabel *dummy*. Jumlah restriksi adalah jumlah individu dikurang satu. n merupakan jumlah observasi dan k merupakan jumlah parameter dalam model *Fixed Effect*. Jumlah observasi (n) adalah jumlah individu dikali dengan jumlah periode, sedangkan jumlah parameter dalam model *Fixed Effect* (k) adalah jumlah variabel ditambah jumlah individu. Apabila nilai F hitung lebih besar dari F kritis maka hipotesis nul ditolak yang artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model *Fixed Effect*. Dan sebaliknya, apabila nilai F hitung lebih kecil dari F kritis maka hipotesis nul diterima yang artinya model yang tepat untuk regresi data panel

adalah model *Common Effect*. Hipotesis yang dibentuk dalam *Chow test* adalah sebagai berikut:

H₀: Model *Common Effect*

H₁: Model *Fixed Effect*

H₀ ditolak jika *P-value* lebih kecil dari nilai α . Sebaliknya diterima jika *P-value* lebih besar dari nilai α . Nilai α yang digunakan sebesar 5%.

3.6.2 Uji Hausman

Hausman telah mengembangkan suatu uji untuk memilih apakah metode *Fixed Effect* dan metode *Random Effect* lebih baik dari metode *Common Effect*. Uji Hausman ini didasarkan pada ide *Least Squares Dummy Variables* (LSDV) dalam metode *Fixed Effect* dan *Generalized Least Squares* (GLS) dalam metode *Random Effect* adalah efisien sedangkan *Ordinary Least Squares* (OLS) dalam metode *Common Effect* tidak efisien. Di lain pihak, alternatifnya adalah metode OLS efisien dan GLS tidak efisien. Karena itu, uji hipotesis nulnya adalah hasil estimasi keduanya tidak berbeda sehingga uji Hausman bisa dilakukan berdasarkan perbedaan estimasi tersebut.

Statistik uji Hausman mengikuti distribusi statistic *Chi-Squares* dengan derajat kebebasan (df) sebesar jumlah variabel bebas. Hipotesis nulnya adalah bahwa model yang tepat untuk

regresi data panel adalah model *Random Effect* dan hipotesis alternatifnya adalah model yang tepat untuk regresi data panel adalah model *Fixed Effect*. Apabila nilai statistik Hausman lebih besar dari nilai kritis *Chi-Squares* maka hipotesis nul ditolak yang artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model *Fixed Effect*. Dan sebaliknya, apabila nilai statistik Hausman lebih kecil dari nilai kritis *Chi-Squares* maka hipotesis nul diterima yang artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model *Random Effect*. Hipotesis yang dibentuk dalam Hausman *test* adalah sebagai berikut:

H_0 : Model *Random Effect*

H_1 : Model *Fixed Effect*

H_0 ditolak jika *P-value* lebih kecil dari nilai α . Sebaliknya, H_0 diterima jika *P-value* lebih besar dari nilai α . Nilai α yang digunakan sebesar 5%.

Setelah mendapatkan parameter estimasi, langkah selanjutnya adalah melakukan berbagai macam pengujian terhadap parameter estimasi tersebut serta pengujian terkait model mana yang terbaik, yang akan dipilih di antara menggunakan metode OLS (*common*), model *Fixed Effect* dan model *Random Effect* (Munandar, 2017).

3.7 Uji Asumsi Klasik

Ada tiga uji asumsi klasik yang harus dipenuhi dalam analisis ini, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

3.7.1 Uji Normalitas

Uji normalitas pada model regresi digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal (Purnomo, 2017: 108). Terdapat dua cara mendeteksi apakah residual memiliki data terdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistic. Pengujian normalitas yang digunakan dalam uji ini adalah uji *Jarque-Bera* (Ghozali dan Ratmono, 2107: 165).

1. jika probabilitas *Jarque Bera* (JB) $> 0,05$ maka residual terdistribusi normal
2. jika probabilitas *Jarque Bera* (JB) $< 0,05$ maka residual tidak terdistribusi normal

3.7.2 Uji Multikolinearitas

Salah satu syarat untuk memakai analisis dengan menggunakan regresi linear berganda terlebih dahulu dilakukan uji multikolinearitas yaitu hubungan sesama variabel bebas. Analisis ini bertujuan untuk melihat korelasi sesama variabel bebas. Apabila terdapat korelasi yang tinggi sesama variabel

bebas maka salah satu diantaranya dieliminir atau dikeluarkan dari model regresi berganda (Jolianis, 2016)

Multikol dapat dilihat dari *Variance Inflation Factors* (VIF), VIF mencoba melihat bagaimana varian dari suatu penaksir (estimator) meningkat seandainya multikolineritas dalam suatu model empiris. Jika VIF dari suatu variabel melebihi 10, maka suatu variabel dikatakan berkolerasi sangat tinggi (Gujarati dan Porter, 2012: 417).

3.7.3 Uji Heteroskedastitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu persamaan ke pengamatan lain. Jika varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas. Sedangkan jika varians berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Sedangkan model regresi yang baik adalah jika tidak terjadinya heteroskedastisitas (Jolianis, 2016). Pengujian dapat dilakukan dengan uji Glejser. Apabila nilai probabilitas $< 0,05$ maka terjadi heterokedastisitas, sebaliknya apabila nilai probabilitas $> 0,05$ maka terjadi homoskedastisitas (Ghozali dan Ratmono, 2107: 108).

3.8 Uji Signifikan

1. Pengujian Hipotesis secara Simultan (Bersama-sama)

Uji statistic F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai

pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Hipotesis nol (H_0) yang hendak diuji adalah apakah semua parameter dalam model sama dengan nol. Artinya, apakah semua variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatif nya (H_a), tidak semua parameter secara simultan sama dengan nol (Priadana dan Muis, 2009: 188).

Menentukan H_0 dan H_a :

$H_{01}: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$ berarti pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan penerimaan zakat secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh.

H_{a1} : minimal ada satu $\beta_i \neq 0$ berarti pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan penerimaan zakat secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

Menentukan kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis:

1. Jika F hitung $>$ F tabel maka H_{a1} diterima (H_{01} ditolak)
2. Jika p -value $<$ α 0,05 maka H_{a1} diterima (H_{01} ditolak)

H_{01} diterima artinya variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, sedangkan H_{01} ditolak artinya variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Untuk mengetahui besarnya (kuat-lemahnya) pengaruh pendapatan asli daerah (X_1), dana perimbangan (X_2) dan penerimaan zakat (X_3), secara bersama-sama terhadap tingkat kemiskinan (Y) ditunjukkan oleh nilai determinasi (R^2 atau *R Square*). Koefisien determinasi digunakan untuk menguji kualitas model. Nilai koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat serta pengaruhnya secara general, dengan *range* antara 0 sampai 1. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel terikat amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat (Zaenuddin, 2018: 190).

2. Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Individual)

Priadana dan Muis (2009:187) menjelaskan bahwa uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Hipotesis nol (H_0) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter sama dengan nol. Artinya, apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Untuk hipotesis alternatifnya (H_a) maka parameter suatu variabel tidak sama dengan nol.

Menentukan H_0 dan H_a :

$H_{02}: \beta_1 = 0$; berarti pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh.

$H_{a2}: \beta_1 \neq 0$; berarti pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh.

$H_{03}: \beta_2 = 0$; berarti dana perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh.

$H_{a3}: \beta_2 \neq 0$; berarti dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh.

$H_{04}: \beta_3 = 0$; berarti penerimaan zakat tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh.

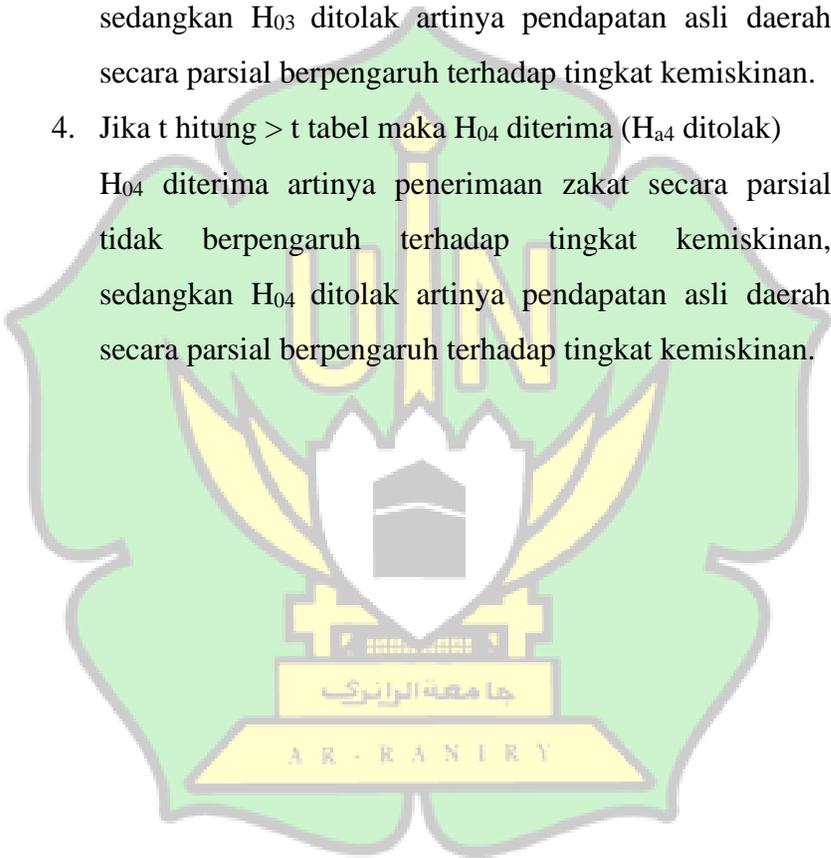
$H_{a4}: \beta_3 \neq 0$; berarti penerimaan zakat berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh.

Menentukan kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis:

1. Jika t hitung $>$ t tabel maka H_{a2} diterima (H_{02} ditolak)
2. Jika p -value $<$ α 0,05 maka H_{a2} diterima (H_{02} ditolak)
 H_{02} diterima artinya pendapatan asli daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan,

sedangkan H_{02} ditolak artinya pendapatan asli daerah secara parsial berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

3. Jika t hitung $>$ t tabel maka H_{03} diterima (H_{a3} ditolak)
 H_{03} diterima artinya dana perimbangan secara parsial tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan H_{03} ditolak artinya pendapatan asli daerah secara parsial berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.
4. Jika t hitung $>$ t tabel maka H_{04} diterima (H_{a4} ditolak)
 H_{04} diterima artinya penerimaan zakat secara parsial tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan H_{04} ditolak artinya pendapatan asli daerah secara parsial berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.



BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1 Statistika Deskriptif

4.1.1 Kemiskinan

Kemiskinan adalah taraf hidup yang rendah atau suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang maupun papan (Elly, Setiadi, dan Kolip, 2011:788). Kemiskinan juga disebut masalah multidimensi dan lintas sektor yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan antara lain tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Kemiskinan tidak hanya melanda Negara-negara berkembang namun juga menjadi problematika di Negara-negara maju. Indonesia, yang merupakan salah satu Negara berkembang di Asia tenggara menjadikan kebijakan otonomi daerah menjadi salah satu sistem yang digunakan untuk dapat memacu pertumbuhan di masing-masing daerah dengan memberikan wewenang kepada daerah tersebut dalam mengatur dan mengelola daerahnya sendiri atau yang disebut juga dengan desentralisasi.

Provinsi Aceh dengan 23 kabupaten/kota merupakan Provinsi paling ujung sebelah barat Indonesia yang juga menjadi

bagian dalam otonomi daerah sebagai daerah otonomi. Meskipun demikian, Provinsi ini juga memiliki tingkat kemiskinan tinggi yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota.

Tingkat kemiskinan 23 Kabupaten/Kota yang berada pada kawasan hukum Provinsi Aceh yang menjadi variabel dependen dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 4.1
Persentase penduduk miskin menurut kabupaten/kota



Sumber: Data diolah (2019)

Gambar 4.1 menunjukkan rata-rata persentase penduduk miskin setiap kabupaten/kota di Provinsi Aceh selama tahun 2013-2017. Berdasarkan gambar tersebut terlihat jika kabupaten yang memiliki persentase penduduk miskin tertinggi adalah

Kabupaten Bener Meriah dengan persentase lebih dari 22%. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemanfaatan lahan pertanian yang ada serta tata kelola pemerintahan yang belum tepat sasaran. Bener Meriah dengan luas lahan tanaman lebih dari 43 ribu hektar seharusnya dapat menjadi modal utama bagi masyarakat maupun pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah tersebut. Selain itu tingkat pendidikan di Kabupaten Bener Meriah juga masih berada jauh dibawah rata-rata Provinsi Aceh, dimana tingkat pendidikan yang rendah menjadi factor yang menyebabkan rendahnya produktifitas yang berimbas pada buruknya tingkat penghasilan dan buruknya kualitas kehidupan (Majid, 2014), sedangkan persentase penduduk miskin terendah berada di Kota Banda Aceh dengan persentase kurang dari 8%. Ini merupakan hal yang wajar yang sudah seharusnya Banda Aceh memiliki persentase penduduk miskin terendah dikarenakan Banda Aceh sebagai ibukota Provinsi Aceh, yang menjadi pusat perekonomian di tanah Serambi Mekkah tersebut. Selain itu sebagai pusat pendidikan menjadikan Banda Aceh menjadi Kota dengan tingkat pendidikan berada jauh diatas rata-rata Provinsi Aceh, yang dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan berimbas pada tingkat produktifitas diwilayah tersebut (Majid, 2014).

Garis merah pada Gambar 4.1 menunjukkan rata-rata penduduk miskin Provinsi Aceh selama tahun 2013-2017. Berdasarkan informasi tersebut terdapat beberapa

kabupaten/kota yang memiliki jumlah penduduk miskin di atas rata-rata Provinsi Aceh yaitu Kabupaten Bener Meriah, Gayo Lues, Pidie Jaya, Aceh Barat, Pidie, Aceh Singkil, Nagan Raya, Simeulue, Kota Subulussalam, Aceh Utara, Aceh Barat Daya dan Kota Sabang.

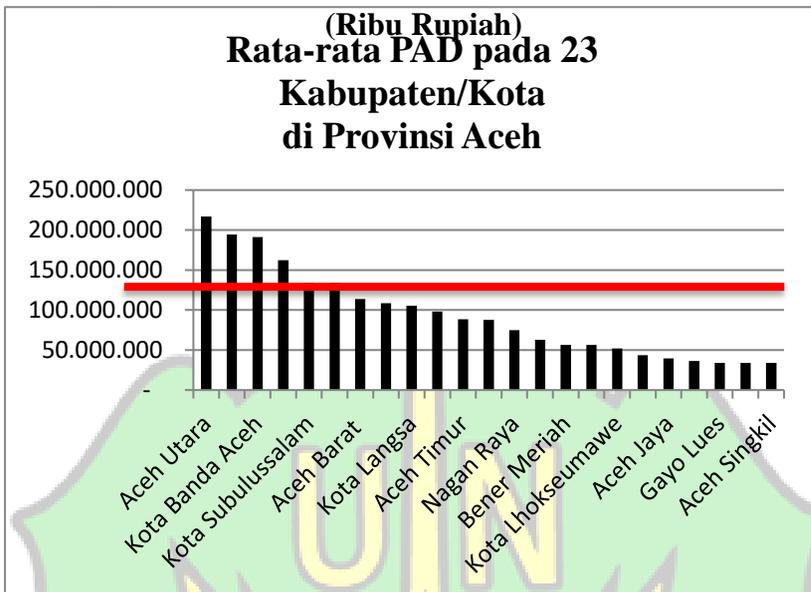
4.1.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kebijakan yang diterapkan melalui otonomi daerah tersebut tentunya harus didukung oleh pendanaan yang memadai guna pembangunan yang direncanakan dapat berjalan lancar. Dalam sistem otonomi daerah keuangan daerah diperoleh dari penerimaan daerah yang berasal dari daerah itu sendiri maupun dari pemerintah pusat sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Penerimaan tersebut diantaranya ialah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penerimaan Pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah/daerah yang bersangkutan, yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain penerimaan yang sah (Adisasmita, 2014).

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu variabel independen dalam penelitian ini. Pada tabel 4.2 dibawah ini dapat dilihat rata-rata dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Berdasarkan gambar tersebut terlihat jika kabupaten yang memiliki jumlah PAD

tertinggi adalah Kabupaten Aceh Utara. Hal ini didominasi oleh tingginya pendapatan dibidang retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam lima tahun serta besarnya kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan serta industri pengolahan terhadap struktur perekonomian yang diterima oleh kabupaten yang pernah dikenal sebagai Kota Petro Dolar tersebut, sedangkan Aceh Singkil menempati posisi dengan jumlah PAD terendah. Hal ini terjadi dikarenakan belum maksimalnya pengelolaan sumber daya alam yang ada. Pengelolaan belum didukung oleh teknologi yang memadai baik dalam hal pertanian maupun perikanan di wilayah tersebut. Garis merah pada Gambar 4.2 menunjukkan rata-rata PAD Provinsi Aceh selama tahun 2013-2017. Berdasarkan informasi tersebut terdapat beberapa kabupaten/kota yang memiliki jumlah PAD di atas rata-rata Provinsi Aceh yaitu Kabupaten Aceh Utara, Pidie, Kota Banda Aceh, Bireuen, Kota Subulussalam, Aceh Tengah, Aceh Besar, Kota Langsa, dan Aceh Tamiang.

Gambar 4.2
Pendapatan Asli Daerah 23 Kabupaten/Kota Provinsi Aceh



Sumber: Data diolah (2019)

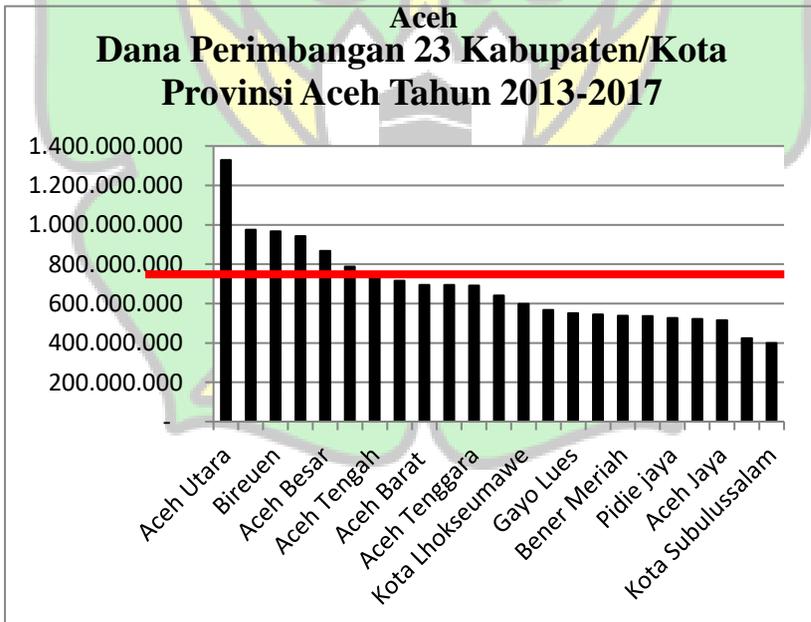
4.1.3 Dana Perimbangan

Berdasarkan UU No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dengan demikian selain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sumber dari daerah itu sendiri, sumber-sumber keuangan daerah juga berasal dari dana transfer Pemerintah pusat untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, terutama bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal

antara Pemerintah dan Pemerintah daerah dan antar Pemerintah daerah yang dapat menunjang peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Dana perimbangan terdiri dari, 1) Dana alokasi umum, 2) Dana alokasi khusus, 3) Dana bagi hasil (Agung Sandewi, 2014).

Dana perimbangan juga merupakan variabel independen dalam penelitian ini. Dimana, rata-rata dana perimbangan yang diterima oleh masing-masing Kabupaten/Kota dalam kurun waktu dari tahun 2013 sampai dengan 2017 dapat dilihat pada tabel 4.3 dibawah ini.

Gambar 4.3
Dana Perimbangan 23 Kabupaten/Kota Provinsi Aceh



Sumber: Data diolah (2019)

Tabel 4.3 menunjukkan rata-rata penerimaan dana perimbangan di 23 Kabupaten/Kota Provinsi Aceh dari Tahun 2013 sampai dengan 2017. Berdasarkan gambar tersebut terlihat jika kabupaten yang memiliki jumlah dana perimbangan tertinggi adalah Kabupaten Aceh Utara. Hal ini didominasi oleh dana alokasi umum yang diterima oleh Kabupaten Aceh Utara yang digunakan untuk pembangunan daerah seperti sektor kesehatan dan pendidikan. Oleh karenanya dapat diartikan bahwa Kabupaten Aceh Utara masih sangat bergantung kepada pemerintah pusat, sedangkan Kota Subulussalam menempati posisi dengan jumlah dana perimbangan terendah. Garis merah pada Gambar 4.3 menunjukkan rata-rata dana perimbangan Provinsi Aceh selama tahun 2013-2017. Berdasarkan informasi tersebut terdapat beberapa kabupaten/kota yang memiliki jumlah dana perimbangan di atas rata-rata Provinsi Aceh yaitu Kabupaten Aceh Utara, Aceh Timur, Bireuen, Pidie, Aceh Besar, Aceh Selatan, Aceh Tengah, Kota Banda Aceh, Aceh Barat, Aceh Tamiang, dan Aceh Tenggara.

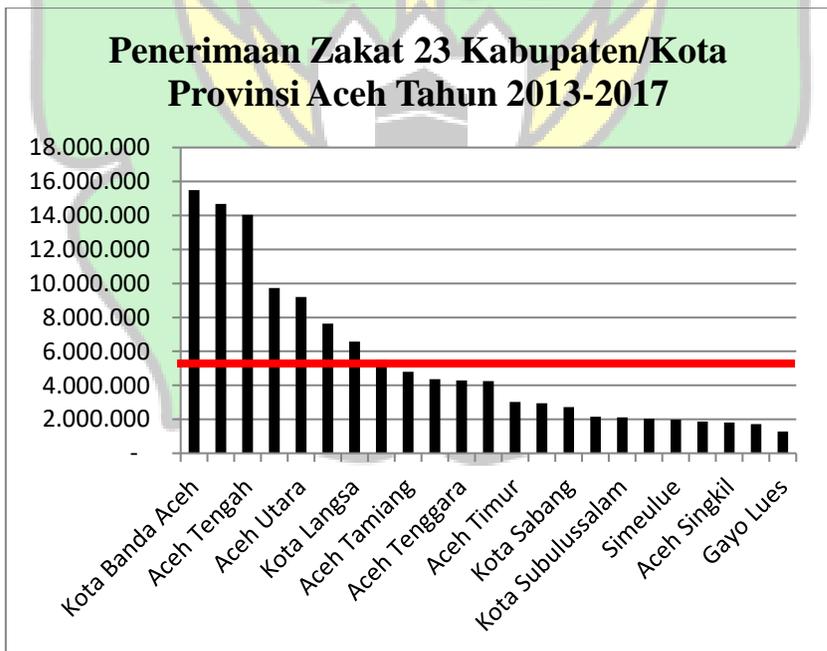
4.1.4 Zakat

Zakat secara terminologi adalah kadar harta tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat. Setiap Muslim diwajibkan mengeluarkan zakat apabila telah cukup memenuhi syarat wajib zakat yang kemudian diserahkan kepada mustahiq (Ridlo, 2014). Dari definisi tersebut jelas bahwa pendistribusian dana zakat tertuju

pada masyarakat bertaraf hidup rendah dan diharapkan dapat memberi perubahan bagi kehidupan mereka sehingga dapat bangkit dari jeratan kemiskinan.

Provinsi Aceh dengan mayoritas penduduk beragama Islam dan juga penyandang Provinsi syariat Islam tentunya memiliki potensi besar dari zakat yang merupakan urutan ke-3 dalam rukun Islam. Hal ini dapat dilihat dalam rata-rata penerimaan zakat yang juga menjadi variabel independen dalam penelitian ini.

Gambar 4.4
Penerimaan Zakat pada 23 Kabupaten/Kota Provinsi Aceh



Sumber: Data diolah (2019)

Tabel 4.4 menunjukkan rata-rata Penerimaan dana zakat di 23 Kabupaten/Kota Provinsi Aceh dari Tahun 2013 sampai dengan 2017. Berdasarkan gambar tersebut terlihat jika kabupaten yang memiliki jumlah zakat tertinggi adalah Kota Banda Aceh. Selaku ibukota Aceh, kota Banda Aceh memiliki potensi zakat yang sangat besar. Penerimaan zakat tidak hanya berasal dari individu masyarakat kota Banda Aceh tetapi juga berasal dari perusahaan-perusahaan yang bernaung dibawah Kota Banda Aceh. Selain itu andil dari Baitul Mal juga menjadi faktor tingginya penerimaan yang diperoleh oleh kota Banda Aceh, sedangkan Kabupaten Gayo Lues menempati posisi dengan jumlah penerimaan zakat terendah. Tingginya tingkat kemiskinan menjadi faktor rendahnya penerimaan zakat di Kabupaten tersebut. Dimana rata-rata kemiskinan di Gayo Lues dalam 5 Tahun terakhir berkisar di 21% atau menempati urutan ke dua rata-rata kemiskinan Kabupaten/Kota setelah Bener Meriah di Provinsi Aceh.

Garis merah pada Gambar 4.4 menunjukkan rata-rata penerimaan zakat Provinsi Aceh selama tahun 2013-2017. Berdasarkan informasi tersebut terdapat beberapa kabupaten/kota yang memiliki jumlah penerimaan zakat di atas rata-rata Provinsi Aceh yaitu Kota Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Tengah, Aceh Barat, Aceh Utara, Bener Meriah, Kota Langsa, dan Kota Lhokseumawe.

4.2 Pengujian Asumsi

Pada analisis regresi data panel perlu dilakukan pengujian asumsi yang meliputi pengujian normalitas, heteroskedastisitas dan multikolinearitas. Berdasarkan hasil pengujian asumsi, maka hasil pengujian asumsi dapat dituliskan sebagai tersebut.

1. Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah residual data yang digunakan berdistribusi normal atau tidak, dengan hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis

H_0 : Residual berdistribusi normal

H_1 : Residual tidak berdistribusi normal

Tabel 4.1
Uji Normalitas

Jarque-Bera	0,174290
Probability	0,916544

Sumber: Eviews (diolah)

Berdasarkan hasil yang didapat pada lampiran 4 nilai *Jarque-Bera* yang didapat sebesar 0,174 dengan nilai peluang *Jarque-Bera* sebesar 0,916. Nilai peluang *Jarque-Bera* ini lebih besar dari α yang dipakai yaitu 0,05 sehingga H_0 tidak dapat ditolak maka dapat disimpulkan jika residual berdistribusi normal.

2. Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas digunakan untuk melihat ada atau tidaknya hubungan antara variabel independen. Multikol dapat dilihat dari *Variance Inflation Factors* (VIF), VIF mencoba melihat bagaimana varian dari suatu penaksir (estimator) meningkat seandainya multikolineritas dalam suatu model empiris. Jika VIF dari suatu variabel melebihi 10, maka suatu variabel dikatakan berkolerasi sangat tinggi dan dapat disimpulkan terdapat multikolinearitas.

. Berdasarkan hasil yang didapat pada lampiran 5 nilai VIF tiap variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.2 dibawah ini.

Tabel 4.2
Nilai VIF

Variabel	Nilai VIF
Pendapatan Asli Daerah	2,59
Dana Perimbangan	2,21
Zakat	1,42

Sumber: Eviews (diolah)

Tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa jika nilai yang didapat dari semua variabel lebih kecil dari 10 maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolineritas.

3. Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas bertujuan untuk melihat apakah varians residual bersifat konstan. Berikut adalah hasil pengujian asumsi heteroskedastisitas :

Hipotesis

H_0 : Tidak terdapat heteroskedastisitas

H_1 : Terdapat heteroskedastisitas

Pengujian dapat dilihat dengan cara melakukan uji glejser yaitu meregresikan variabel bebas dengan nilai absolutnya. Berdasarkan hasil yang didapat pada lampiran 6 nilai probability dapat dilihat pada tabel 4.3 dibawah ini.

Tabel 4.3
Nilai Uji Glejser

No	Variabel	Probability
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	0,3235
2	Dana Perimbangan	0,1291
3	Zakat	0,2896

Sumber: Eviews (diolah)

Dari 4.1 diatas dapat diketahui bahwa nilai *probability* dari semua variabel independen yang didapatkan lebih besar dari nilai *alpha* yang digunakan yaitu 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan terbebas dari heteroskedastisitas.

4.3 Estimasi Model Data Panel

Pada analisis regresi data panel terdapat tiga pendekatan dalam menduga model yaitu *common effect model*, *fixed effect model*, dan *random effect model*. Berikut adalah hasil estimasi model regresi data panel menggunakan ketiga model tersebut:

1. *Common Effect Model*

Common effect model merupakan model estimasi regresi data panel paling sederhana. Berdasarkan hasil estimasi menggunakan *common effect model* seperti terlampir pada lampiran 2 maka model umum *common effect model* adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = 2,211 - 0,116X_{1i,t} + 0,186X_{2i,t} - 0,070X_{3i,t}$$

2. *Fixed effect model*

Fixed effect model merupakan model estimasi regresi data panel dengan metode *Least Square Dummy Variable* (LSDV). Berdasarkan hasil pada lampiran 2 maka model umum *fixed effect model* adalah :

$$Y_{it} = 8,269 - 0,157X_{1i,t} - 0,086X_{2i,t} - 0,055X_{3i,t}$$

3. *Random effect model*

Pada *random effect model* perbedaan karakteristik individu dan waktu diakomodasikan pada *error* dari model, hal ini berbeda dengan *fixed effect model* dimana perbedaan karakteristik individu diakomodasikan melalui *dummy*. Berdasarkan hasil pada lampiran 2, didapatkan model umum untuk *random effect model* adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = 2,211 - 0,116X_{1i,t} + 0,186X_{2i,t} - 0,070X_{3i,t}$$

4.4 Pemilihan Model Regresi Data Panel

Pemilihan model bertujuan untuk memilih model regresi data panel terbaik dari tiga model regresi data panel yaitu *common effect model*, *fixed effect model*, dan *random effect model*. Untuk memilih model terbaik dilakukan beberapa pengujian statistik yaitu *chow test*, *hausman test*, dan *lagrange multiplier test*. Berdasarkan hasil pada lampiran 3, maka hasil pengujiannya adalah sebagai berikut :

1. Chow Test

Hipotesis :

H_0 : Model pendugaan merupakan *commont effect model*

H_1 : Model pendugaan merupakan *fixed effect model*

Berdasarkan output pada lampiran 3 nilai *cross section* yang didapat sebesar 1,706 dengan nilai peluang sebesar 0,042, nilai peluang ini lebih kecil dari α yang ditetapkan yaitu 0,05 sehingga H_0 ditolak. Maka model pendugaan yang lebih baik digunakan adalah *fixed effect model* dibandingkan dengan *common effect model*.

2. Hausmant Test

Hipotesis

H_0 : Model pendugaan merupakan *random effect model*

H_1 : Model pendugaan merupakan *fixed effect model*

Berdasarkan output hasil analisis pada lampiran 3 nilai *chi-square statistic* yang didapat sebesar 21,45 dengan nilai peluang sebesar 0,001. Nilai peluang yang didapat ini lebih kecil dari α yang ditetapkan yaitu 0,05 sehingga H_0 ditolak. Maka model pendugaan yang lebih baik digunakan adalah *fixed effect model* dibandingkan dengan *random effect model*.

Pengujian *lagrange multiplier* tidak perlu dilakukan karena berdasarkan *chow test* dan *hausmant test* telah diketahui jika model yang cocok untuk menganalisis data ini adalah *fixed effect model*.

Pemilihan model terbaik juga bisa dilakukan dengan melihat koefisien determinasi (R^2), dan *Akaika Information Criterion* (AIC). Kriteria pemilihan model regresi terbaik dengan nilai R^2 adalah dengan nilai R^2 tertinggi, sedangkan pemilihan model terbaik menggunakan kriteria AIC adalah model yang memiliki nilai AIC terendah. Dengan demikian semakin tinggi nilai R^2 dan semakin rendah nilai AIC maka model akan semakin baik. Berikut adalah perbandingan nilai R^2 dan AIC dari *common effect model*, *fixed effect model*, dan *random effect model*.

Tabel 4.4
Perbandingan Nilai AIC dan R² Pendugaan Model

Perbandingan Model	<i>Common Effect</i>	<i>Fixed Effect</i>	<i>Random Effect</i>
R ²	17,609%	42,050%	17,609%
AIC	- 0,032	- 0,001	- 0,032

Sumber: Eviews (diolah)

Berdasarkan tabel 4.1 diatas terlihat bahwa nilai R² tertinggi berada pada *fixed effect model*, begitu juga dengan nilai AIC dengan nilai terendah diperoleh dari *fixed effect model*. Hal ini sejalan dengan dengan pengujian pemilihan model regresi data panel terbaik menggunakan *chow test* dan *hausman test*. Sehingga model terbaik yang digunakan untuk menganalisis data ini adalah *fixed effect model*.

4.5 Uji Kelayakan Model Regresi Data Panel yang Terpilih

Berdasarkan pengujian pemilihan model, model yang terpilih adalah *fixed effect model*. Pengujian kelayakan model untuk *fixed effect model* terdapat pada lampiran 2. Pengujian kelayakan model bertujuan untuk melihat apakah model yang terpilih mampu mengestimasi parameter dengan baik. Uji kelayakan model meliputi uji simultan, uji parsial, dan koefisien determinasi.

1. Pengujian Hipotesis secara Simultan (Uji F)

Hipotesis:

$H_{01}: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$ berarti pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan penerimaan zakat secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh.

H_{a1} : minimal ada satu $\beta_i \neq 0$ berarti pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan penerimaan zakat secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

Berdasarkan output hasil analisis *fixed effect model* pada lampiran 2 didapatkan nilai $F_{\text{statistik}}$ sebesar 2,583 dengan nilai peluang sebesar 0,0005. Nilai peluang yang didapat pada uji ini lebih kecil dari α yang ditetapkan yaitu sebesar 0,05 sehingga H_0 ditolak. Maka dapat disimpulkan variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

2. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk melihat sejauh mana kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen. Dalam penelitian ini nilai R^2 yang didapat berdasarkan hasil dari lampiran 6 adalah sebesar 0,4205 atau 42,05%.

Nilai R^2 ini menunjukkan jika Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan dana zakat mampu menjelaskan tingkat kemiskinan sebesar 42,05%, sedangkan yang lainnya

dipengaruhi oleh faktor–faktor lain yang tidak masuk ke dalam model.

3. Pengujian Hipotesis secara Parsial (Uji t)

Hipotesis:

$H_0: \beta_k = 0$, untuk $k = 1,2,3$ (variabel independen ke- k tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan).

$H_1: \beta_k \neq 0$ untuk $k = 1,2,3$ (variabel independen ke- k berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan).

Berdasarkan output hasil analisis *fixed effect model* pada lampiran 6 Hasil pengujian secara parsial dapat dilihat pada tabel 4.2 dibawah ini

Tabel 4.5
Nilai Koefisien Slope Dan P-value Uji Parsial

Variabel bebas	Jenis Variabel	Koefisien Slope	P-value
X1	PAD	- 0,157	0,0056
X2	Dana Perimbangan	- 0,086	0,5019
X3	Zakat	- 0,028	0,0523

Sumber: Eviews (diolah)

Dari tabel 4.4 diatas dapat dilihat bahwa nilai koefesien dari ketiga variabel bebas X1, X2, dan X3 bernilai negatif. Artinya setiap kenaikan satu satuan sektor tersebut akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar nilai koefisiennya. Namun dari tiga variabel tersebut yang berpengaruh signifikan

pada α sebesar 0,05 hanya satu variabel yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan zakat signifikan pada α sebesar 0,1. Sedangkan variabel dana perimbangan tidak mengalami pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

4.6 Interpretasi Model

Fixed effect model merupakan model pendugaan parameter yang mengasumsikan jika nilai koefisien *slope* setiap unit *cross section* tetap dan intersep berbeda. Model umum *fixed effect model* untuk pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan zakat terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 Y_{it} = & 8,269 - 0,243d_1 + 0,143d_2 + 0,007d_3 - 0,199d_4 - 0,288d_5 + \\
 & 0,008d_6 + 0,170d_7 + 0,007d_8 - 0,268d_9 - 0,079d_{10} + \\
 & 0,208d_{11} + 0,114d_{12} - 0,067d_{13} - 0,115d_{14} + 0,022d_{15} + \\
 & 0,333d_{16} + 0,042d_{17} - 0,101d_{18} - 0,013d_{19} + 0,125d_{20} + \\
 & 0,246d_{21} + 0,104d_{22} - 0,156d_{23} - 0,157X_{1i,t} - 0,086X_{2i,t} - \\
 & 0,055X_{3i,t}
 \end{aligned}$$

dimana :

i (kabupaten) = 1,2,...,23

t (tahun) = 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

d_i = variabel *dummy* kabupaten ke- i

Jika kabupaten ke- $i = 1$, maka Kabupaten/Kota lainnya akan bernilai 0. Berikut adalah deskripsi kabupaten/kota berdasarkan *dummy*.

Tabel 4.6
Deskripsi Kabupaten/Kota Berdasarkan *Dummy*

Dummy	Kabupaten/Kota
d ₁	Simeulu
d ₂	Aceh Singkil
d ₃	Aceh Selatan
d ₄	Aceh Tenggara
d ₅	Aceh Timur
d ₆	Aceh Tengah
d ₇	Aceh Barat
d ₈	Aceh Besar
d ₉	Aceh Pidie
d ₁₀	Aceh Bireuen
d ₁₁	Aceh Utara
d ₁₂	Aceh Barat Daya
d ₁₃	Gayo Lues
d ₁₄	Aceh Tamiang
d ₁₅	Nagan Raya
d ₁₆	Aceh Jaya
d ₁₇	Bener Meriah
d ₁₈	Pidie Jaya
d ₁₉	Kota Banda Aceh
d ₂₀	Kota Sabang
d ₂₁	Kota Langsa
d ₂₂	Kota Lhokseumawe
d ₂₃	Kota Subulussalam

4.7 Model Alternatif

Model alternatif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengukur tingkat kemiskinan dari komponen

perhitungan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, zakat dan tingkat kemiskinan. Komponen yang digunakan yaitu jumlah dana Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan perimbangan, dana zakat, jumlah penduduk miskin, dan persentase penduduk miskin.

Pada model alternatif ini dibentuk 3 model dengan mengkombinasikan variabel tersebut. Model 1 adalah model dengan menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, zakat, dan persentase penduduk miskin. Model 2 adalah model menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, zakat, dan jumlah penduduk miskin dalam jiwa. Model 3 adalah model menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, zakat, dan persentase penduduk miskin. Tujuan melakukan model alternatif ini adalah untuk melihat perbandingan secara parsial sector-sektor apa saja yang signifikan terhadap kemiskinan dan dengan beberapa perubahan ukuran variabel. Hasil pengujian parsial dari masing-masing model disajikan pada tabel 4.6.

Untuk mendapatkan hasil seperti yang disajikan pada Tabel 4.6 terlebih dahulu dilakukan analisis regresi data panel. Analisis regresi data panel yang digunakan adalah fixed effect model dengan model sebagai berikut :

$$Y_{it} = 8,269 - 0,243d_1 + 0,143d_2 + 0,007d_3 - 0,199d_4 - 0,288d_5 + 0,008d_6 + 0,170d_7 + 0,007d_8 - 0,268d_9 - 0,079d_{10} + 0,208d_{11} + 0,114d_{12} - 0,067d_{13} - 0,115d_{14} + 0,022d_{15} + 0,333d_{16} + 0,042d_{17} - 0,101d_{18} - 0,013d_{19} + 0,125d_{20} + 0,246d_{21} + 0,104d_{22} - 0,156d_{23} - 0,157X_{1i,t} - 0,086X_{2i,t} - 0,055X_{3i,t}$$

Pada model 2 analisis regresi data panel yang diterapkan adalah common effect model dengan model sebagai berikut:

$$Y_{it} = -22,435 - 0,119X_{1i,t} + 1,772X_{2i,t} - 0,071X_{3i,t}$$

Pada model 3 analisis regresi data panel yang diterapkan adalah random effect model dengan model sebagai berikut:

$$Y_{it} = 2,211 - 0,116X_{1i,t} + 0,186X_{2i,t} - 0,071X_{3i,t}$$

Tabel 4.7**Perbandingan Uji Parsial Pada Alternatif Model**

Variabel bebas	Jenis Variabel	Model 1	Model 2	Model 3
		Koefisien slope	Koefisien slope	Koefisien slope
X1	PAD	- 0,157	- 0,119	- 0,116
X2	Dana Perimbangan	- 0,086	1,772	0,186
X3	Zakat	- 0,055	- 0,071	- 0,071

Sumber: Eviews (diolah)

Berdasarkan hasil pada tabel 4.6 diatas ketiga variabel memiliki koefisien negatif pada model 1, yang artinya variabel tersebut berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa jika PAD, dana perimbangan, dan zakat meningkat maka dapat menurunkan kemiskinan. Namun dari tiga variabel tersebut hanya satu yang signifikan terhadap α 0,05 yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pada model 2, terdapat satu variabel yang memiliki nilai koefisien positif yaitu dana perimbangan. Artinya jika adanya peningkatan pada dana perimbangan maka akan meningkatkan kemiskinan. Sedangkan dua variabel lainnya PAD dan zakat memiliki nilai koefisien negatif yang artinya jika PAD dan zakat meningkat maka dapat menurunkan kemiskinan. Namun dari

tiga variabel tersebut hanya satu yang signifikan terhadap *alpha* 0,05 yaitu dana perimbangan.

Pada model 3, terdapat satu variabel yang memiliki nilai koefisien positif yaitu dana perimbangan. Artinya jika adanya peningkatan pada dana perimbangan maka akan meningkatkan kemiskinan. Sedangkan dua variabel lainnya PAD dan zakat memiliki nilai koefisien negatif yang artinya jika PAD dan zakat meningkat maka dapat menurunkan kemiskinan. Pada model ini dari tiga variabel terdapat dua variabel yang signifikan terhadap *alpha* 0,05 yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan zakat.

Berdasarkan uraian diatas maka variabel-variabel yang dianggap signifikan pada Model 1, Model 2, dan Model 3 adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan zakat. Dimana ketiga variabel tersebut dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan pemerintah dalam hal tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persentase kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

Keberhasilan suatu daerah dalam mengatur dan mengelola daerahnya sendiri dapat dilihat melalui tingkat pendapatan yang diterima oleh daerah tersebut. Semakin tinggi suatu daerah memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka dapat dikatakan bahwa daerah tersebut berhasil dan secara mandiri mampu membangun pertumbuhan daerahnya sendiri. Daerah yang terus berkembang dan memiliki pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat akan mengurangi tingkat pengangguran yang berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan. Sebagaimana hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, semakin tinggi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan menurunkan persentase kemiskinan di Provinsi Aceh. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Marianus Manek dan Rudy Badrudin (2016).

2. Dana perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap persentase kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Semakin besar transfer dana perimbangan yang diterima dari Pemerintah pusat akan memperlihatkan semakin kuat Pemerintah daerah tergantung kepada Pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhannya sehingga akan membuat kinerja keuangan daerah menurun. Dengan kata lain semakin tinggi penerimaan dana perimbangan oleh daerah tidak dapat menjadi tolak ukur tumbuh dan berkembangnya suatu daerah. Hal itu dapat dibuktikan melalui hasil dari penelitian ini yang menemukan bahwa dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap persentase kemiskinan. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Paat dkk (2017).
3. Zakat berpengaruh terhadap persentase kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Pendistribusian dana zakat tertuju pada masyarakat bertaraf hidup rendah. Dengan demikian dana zakat dapat dijadikan alternatif dalam pengentasan kemiskinan. Melalui hasil penelitian ini dapat membuktikan bahwa semakin meningkatnya penerimaan zakat maka akan menurunkan persentase kemiskinan dalam hal ini Provinsi Aceh. Hasil ini juga didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Amalia dan Mahalli (2012) yang menyatakan bahwa zakat berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

4. Secara simultan semua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap persentase kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh dengan nilai signifikan 0,0005

5.2 Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian diketahui jika variabel yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh adalah realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga pemerintah diharapkan dapat memperhatikan pada sektor ini. Semakin tinggi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), menandakan daerah telah mampu mengelola daerahnya sendiri secara mandiri dan tentunya dapat menekan angka kemiskinan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi ataupun acuan bagi pemerintah Aceh dalam hal menanggulangi tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh sehingga angka kemiskinan dapat ditekan guna tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat.
3. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan menganalisis pengaruh pengangguran, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan zakat terhadap jumlah penduduk miskin.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Nur Karim Terjemahan*. Departemen Agama RI. Bandung: CV Darus Sunnah.
- Adisasmita, R. (2014). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Agung Sandewi, A. A. (2014). Pengaruh Dana Perimbangan dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Keserasian Anggaran dan Kesejahteraan Masyarakat Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *Ekonomi dan Bisnis*, 356-376.
- Al-'Awaysyah, H. (2008). *Ensiklopedia Fiqih Praktis menurut Al-quran dan Sunnah Jilid 2*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Al-ghazali, A. M. (1990). Asrar Ash-shaun wa Asrar Az-zakat. In M. Al-Baqir, *Rahasia Puasa dan Zakat*. Bandung: Karisma.
- Al-Jazairi, A. B. (2000). *Ensiklopedia Muslim*. Jakarta: Darul Fallah.
- Al-Qardhawi, Y. (2007). *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.
- Amalia, & Mahalli, K. (2012). Potensi dan Peranan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Medan. *Ekonomi dan Keuangan*, 70-87.
- Andirfa, M., Basri, H., & Majid, M. A. (2016). Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan, dan Pendapat Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten dan Kota Di Provinsi Aceh. *Magister Akuntansi*, 30-38.

- Andryanto, I. (2011). Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Penguatan Kemiskinan. *Penelitian Sosial Keagamaan*, 25-46.
- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.
- Ar Rahman, S. A. (2003). *Zakat 1001 Masalah dan Solusinya*. Jakarta: Pustaka Cerdas Zakat.
- Arifin, G. (2016). *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah, Dalil-dalil dan Keutamaan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Arifin, J. (2008). *Statistik Bisnis Terapan dengan Microsoft Excel 2007*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Ash-shiddiqi, T. H. (2009). *Pedoman Zakat*. Semarang: PT. Pustaka Riski Putra.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fikih Islam Wa Adilatuhi*. Jakarta: Gema Insani.
- Badrudin, R., & Manek, M. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Telaah Bisnis*, 81-98.
- Basri, F. (2002). *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Basri, H., Andirfa, M., & Majid, M. S. (2016). Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh. *Magister Akuntansi*, 30-38.
- Beik, I. S. (2009). Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi kasus Dompot Dhuafa Republika. *Pemikiran dan Gagasan*, 1-15.
- Bhinadi, A. (2017). *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish.

- Ekananda, M. (2015). *Ekonometrika Dasar untuk Penelitian Ekonomi, Sosial dan Bisnis*. Jakarta: Wita Wacana Media.
- Elly , Setiadi, M., & Kolip, U. (2011). *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Prenamedia.
- Ersita , M., & Elim, I. (2016). Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sulawesi Utara. *EMBA*, 889-897.
- Frans, d., Rahayu, S., & Mahardika, D. P. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Perkapita, dan tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat. *e-Proceeding of Management*, 16661675.
- Gani, I., & Amalia, S. (2015). *ALAT ANALISIS DATA: Aplikasi Statistik untuk Penelitian Bidang Ekonomi dan Sosial*. Yogyakarta: ANDI OFFSET.
- Ghozali, I., & Ratmono, D. (2107). *Analisis Multivariat dan Ekonometrika dengan Eviews 10*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D., & Porter, D. (2012). *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Jakarta: Salemba Empat.
- Gulo, W. (2002). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Halim, A. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Handayani, S. P., Abdullah, S., & Fahlevi, H. (2015). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. *Magisster Akuntansi*, 45-50.

- Harahap, U. R. (2017). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kab/Kota Provinsi Sumatra Utara. *Akuntansi dan Keuangan Syariah*, 118-130.
- Hermawan, A. (2005). *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Hidayah, N., & Setiyawati, H. (2014). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Langsung di Provinsi Jawa Tengah. *Akuntansi*, 45-58.
- Ilham, M., & Nurhadi. (2008). *Fikih Sunnah Wanita*. Jakarta: Pustaka Al- Kautsar.
- Ismail, M., Santosa, D. B., & Yustika, A. E. (2014). *Sistem Ekonomi Indonesia*. Surabaya: Erlangga.
- Iswara, I. A., & Indrajaya, I. B. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Perkapita, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Bali. *EP Unud*, 492-501.
- Ja'far, M. (2007). *Tuntunan Ibadah Zakat, Puasa dan Haji*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Jolianis. (2016). Analisis Pengaruh PAD, DAU, dan DAK Terhadap Kemiskinan Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatra Barat dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening. *Economic and Economic Education*, 192-209.
- Kasim, M. (2006). *Karakteristik Kemiskinan di Indonesia dan Strategi Penanggulangannya*. Jakarta: Indomedia.
- Kuncoro, M. (2014). *Otonomi Daerah*. Surabaya: Erlangga.
- Kurniawan, M. (2017). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Di Kabupaten Musi Banyuasin. *Ekonomi Global Masa Kini*, 71-83.

- Majid, M. A. (2014). Analisis Tingkat Pendidikan dan Kemiskinan Di Aceh. *Pencerahan*, 15-37.
- Manek, M., & Badrudin, R. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Telaah Bisnis*, 81-98.
- Masyitah, N., & Mislinawati. (2017). Upaya Pemerintah Dalam menanggulangi Pemerintah. *Pesona Dasar*, 30-36.
- Mawarni, Darwanis, & Abdullah, S. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah. *Akuntansi*, 80-90.
- Maznawati, E. S., Ilat, V., & Elim, I. (2015). Analisis Penerimaan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Maluku Utara. *EMBA*, 906-915.
- Munandar, A. (2017). Analisis Regresi Data Panel Pada Pertumbuhan Ekonomi di Negara-Negara Asia. *Ekonomi Global Masa Kini*, 59-67.
- Nadir, S. (2013). Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Politik Profetik*, 65-87.
- Noor, J. (2017). *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana.
- Novalistia, R. L. (2016). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Tengah. *Accounting*, 186-193.
- Nuryanto, & Pambuko, Z. B. (2018). *Eviews untuk Analisa Ekonometrika Dasar: Aplikasi dan Interpretasi*. Magelang: UNIMMA PRESS.

- Nuzulistiyani, K. R., Supriyanto, A., & Paramita, P. D. (2017). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah. *Accounting*, 21-42.
- Paat, D. C., Koleangan, R. A., & Rimate, V. A. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta Dampaknya Terhadap Kemiskinan di Kota Bitung. *Pembangunan Ekonomi dan Keuangan*, 122-132.
- Paulus, D. I., Koleangan, R. A., & Engka, D. S. (2017). Analisa Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kemiskinan melalui Belanja Daerah di Kota Bitung. *Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 112-130.
- Payadnya, I. A., & Jayantika, I. N. (2018). *Panduan Penelitian Eksperimen beserta Analisa Statistik dengan SPSS*. Yogyakarta: Deepublish.
- Pratama, Y. C. (2015). Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan. Studi kasus: Program Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional. *Tauhidinomics*, 93-104.
- Priadana, M. S., & Muis, S. (2009). *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Purnomo, R. A. (2017). *Analisa Statistik Ekonomi dan Bisnis dengan SPSS*. Ponogoro: CV. WADE GROUP.
- Qhardawi, Y. (2007). Hukum Zakat. In S. Harun, D. Hafiduddin, & Hasanuddin, *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Lentera Antar Nusa.
- Ramlan, Darwanis, & Abdullah, S. (2016). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli

- Daerah yang Sah, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal. *Magister Akuntansi*, 79-88.
- Ridlo, A. (2014). Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Al-'adli*, 119-137.
- Rusmiyati, C. (2012). Kebijakan Pemerintah Kabupaten Malang dalam Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal PKS*, 57-72.
- Salindeho, C. (2016). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Daerah di Provinsi Sulawesi Utara. *EMBA*, 705-716.
- Sari, E. K. (2006). *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Sasana, H. (2011). Analisis Determinan Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Dalam Era Otonomi dan Desentralisasi Fiskal. *Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, 46-58.
- Setiyawati, A. (2007). Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK dan Belanja Pembangunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengangguran. *Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 211-228.
- Sudewi, N. N. (2013). Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Provinsi Bali. *EP Unud*, 135-141.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Suharso, P. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif untuk Bisnis*. Jakarta: PT. Remaja Rosida Karya.
- Suryana. (2010). *Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Susanti, H., Syechalad, M. N., & Hamzah, A. (2017). Analisa Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran

Pemerintah Aceh Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Aceh Setelah Tsunami. *Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia*, 1-12.

Susanti, s., & fahlevi, H. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi (JIMEKA)*, 183-191.

Wati, M. R., & Fajar, C. M. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung. *Kajian Akuntansi*, 59-72.

wijaya, H. (2004). *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Winarno, W. W. (2011). *Analisi Ekonometrika Dan Statistika dengan Eviews*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Zaenuddin, M. (2018). *Isu, Problematika, dan Dinamika Perekonomian dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Deepublish.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Tabulasi Data Penelitian

No	Kabupaten/ Kota	Kemiskinan (%)	Pendapatan Asli Daerah (ribu rupiah)	Dana Perimbangan (ribu rupiah)	Zakat (ribu rupiah)
1	Simeulue	20,57	15.309.779	445.173.949	1.126.750
2	Aceh Singkil	18,73	16.5564.886	424.334.992	881.982
3	Aceh Selatan	13,44	36.181.172	629.328.498	1.967.662
4	Aceh Tenggara	14,39	25.620.560	541.500.010	3.106.258
5	Aceh Timur	16,59	42.805.237	776.913.530	2.039.922
6	Aceh Tengah	17,76	76.870.447	589.608.668	8.123.851
7	Aceh Barat	23,70	46.928.109	610.304.628	7.000.381
8	Aceh Besar	16,88	76.107.259	729.735.966	11.883.420
9	Pidie	21,12	76.878.684	781.228.244	735.227
10	Bireuen	17,65	93.893.140	801.415.712	1.759.363
11	Aceh Utara	20,34	99.869.693	1.258.034.779	5.677.094
12	Aceh Barat Daya	18,92	32.534.985	456.225.165	1.350.157
13	Gayo Lues	22,33	20.213.909	459.314.156	747.971
14	Aceh Tamiang	15,13	42.592.561	563.364.653	904.002
15	Nagan Raya	21,75	37.942.006	560.709.514	3.146.488
16	Aceh Jaya	17,53	20.646.749	426.815.210	837.000
17	Bener Meriah	23,47	13.557.270	457.570.439	5.346.552
18	Pidie jaya	22,70	14.052.583	429.030.849	1.315.875
19	Kota Banda Aceh	8,03	129.170.160	631.733.133	13.350.613
20	Kota Sabang	18,31	27.377.339	359.624.739	2.225.060
21	Kota Langsa	12,62	57.243.384	445.928.779	1.562.158
22	Kota Lhokseumawe	12,47	36.213.933	550.942.082	1.403.134
23	Kota Subulussalam	20,57	7.877.324	305.106.997	103.085

Data Tahun 2013. Diolah

Lanjutan

No	Kabupaten/ Kota	Kemiskinan (%)	Pendapatan Asli Daerah (ribu rupiah)	Dana Perimbangan (ribu rupiah)	Zakat (ribu rupiah)
1	Simeulue	19,92	37.593.744	470.729.999	3.455.000
2	Aceh Singkil	17,77	31.029.905	457.272.585	936.358
3	Aceh Selatan	12,79	78.487.064	673.220.063	2.689.957
4	Aceh Tenggara	13,75	56.043.722	584.759.166	3.347.873
5	Aceh Timur	15,88	86.544.531	915.658.505	2.403.144
6	Aceh Tengah	16,99	130.608.443	641.572.833	13.212.300
7	Aceh Barat	22,97	112.034.104	646.402.652	8.700.264
8	Aceh Besar	16,13	114.542.978	779.747.539	14.180.290
9	Pidie	20,29	149.164.352	838.826.639	601.256
10	Bireuen	16,94	172.302.227	866.656.550	2.259.329
11	Aceh Utara	19,58	178.490.134	1.282.846.568	8.782.785
12	Aceh Barat Daya	17,99	58.384.748	497.466.670	1.818.270
13	Gayo Lues	21,43	28.906.171	488.361.578	842.495
14	Aceh Tamiang	14,58	97.374.583	615.025.606	1.440.396
15	Nagan Raya	20,85	65.177.802	604.833.781	4.006.400
16	Aceh Jaya	16,52	36.406.713	460.065.588	1.266.014
17	Bener Meriah	22,45	44.090.832	494.078.487	6.932.944
18	Pidie jaya	21,78	30.312.850	469.165.879	1.601.738
19	Kota Banda Aceh	7,78	171.777.262	685.952.795	15.264.336
20	Kota Sabang	17,02	42.723.294	382.299.897	2.502.445
21	Kota Langsa	12,08	114.168.697	479.418.226	3.108.044
22	Kota Lhokseumawe	11,93	48.730.217	565.796.575	4.967.445
23	Kota Subulussalam	19,72	25.219.047	325.988.167	1.579.223

Data Tahun 2014. Diolah

Lanjutan

No	Kabupaten/ Kota	Kemiskinan (%)	Pendapatan Asli Daerah (ribu rupiah)	Dana Perimbangan (ribu rupiah)	Zakat (ribu rupiah)
1	Simeulue	20,43	35.906.840	511.899.571	1.865.050
2	Aceh Singkil	21,72	37.100.893	494.386.136	1.210.000
3	Aceh Selatan	13,24	79.039.082	712.877.710	3.704.670
4	Aceh Tenggara	14,91	64.230.377	620.213.993	4.959.587
5	Aceh Timur	15,85	104.856.211	915.658.505	3.392.519
6	Aceh Tengah	17,51	147.854.426	667.174.087	16.113.239
7	Aceh Barat	21,46	120.034.104	679.255.783	9.508.143
8	Aceh Besar	15,93	103.534.638	805.322.150	14.099.509
9	Pidie	21,18	189.252.525	864.170.04	653.834
10	Bireuen	16,94	168.341.627	879.669.267	3.069.661
11	Aceh Utara	19,20	192.540.263	1.227.130.949	12.936.439
12	Aceh Barat Daya	18,25	60.000.000	511.678.896	2.448.346
13	Gayo Lues	21,95	28.347.657	516.327.341	1.651.229
14	Aceh Tamiang	14,57	108.301.269	661.760.650	5.550.945
15	Nagan Raya	20,13	65.795.441	701.006.080	3.439.350
16	Aceh Jaya	15,93	36.836.018	495.169.269	1.761.542
17	Bener Meriah	21,55	59.618.500	501.806.052	9.212.262
18	Pidie jaya	21,40	30.116.183	487.049.180	2.142.509
19	Kota Banda Aceh	7,72	157.087.668	693.204.180	16.670.652
20	Kota Sabang	17,69	51.541.736	423.242.148	2.629.875
21	Kota Langsa	11,62	110.346.992	494.789.923	22.801.400
22	Kota Lhokseumawe	12,16	48.458.013	558.277.010	6.567.773
23	Kota Subulussalam	20,39	35.018.771	348.678.266	2.974.906

Data Tahun 2015. Diolah

Lanjutan

No	Kabupaten/ Kota	Kemiskinan (%)	Pendapatan Asli Daerah (ribu rupiah)	Dana Perimbangan (ribu rupiah)	Zakat (ribu rupiah)
1	Simeulue	19,93	48.646.142	612.714.265	2.000.000
2	Aceh Singkil	21,60	35.320.758	649.950.005	2.000.000
3	Aceh Selatan	13,48	125.989.167	979.994.635	7.055.809
4	Aceh Tenggara	14,46	61.457.041	954.747.478	5.700.000
5	Aceh Timur	15,06	94.337.445	1.051.942.855	3.752.082
6	Aceh Tengah	16,64	156.130.103	884.080.675	16.731.611
7	Aceh Barat	20,38	140.614.497	752.608.323	12.643.380
8	Aceh Besar	15,55	135.284.504	1.057.384.176	17.632.462
9	Pidie	21,25	249.489.454	1.136.572.837	6.310.396
10	Bireuen	15,95	186.162.576	1.120.470.574	4.065.967
11	Aceh Utara	19,46	377.268.144	1.296.652.358	5.750.740
12	Aceh Barat Daya	18,03	80.496.802	735.978.021	2.881.217
13	Gayo Lues	21,86	46.277.349	710.193.971	1.632.797
14	Aceh Tamiang	14,51	114.051.093	863.883.794	7.461.714
15	Nagan Raya	19,25	104.202.918	650.964.914	4.626.213
16	Aceh Jaya	15,01	45.774.375	655.719.358	2.133.337
17	Bener Meriah	21,43	66.455.653	645.559.881	8.218.987
18	Pidie jaya	21,18	45.986.243	677.272.844	3.200.000
19	Kota Banda Aceh	7,41	258.469.579	801.801.079	18.674.674
20	Kota Sabang	17,33	47.776.631	504.011.995	3.246.796
21	Kota Langsa	11,09	121.369.467	656.804.723	2.487.415
22	Kota Lhokseumawe	11,98	56.348.631	688.355.158	8.528.027
23	Kota Subulussalam	19,57	40.984.794	549.451.984	3.071.497

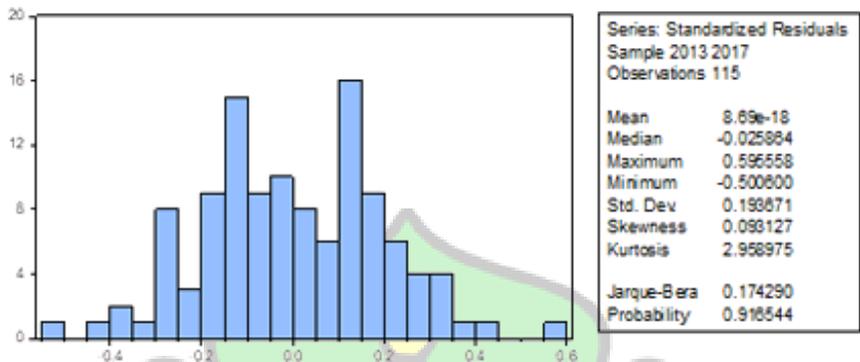
Data Tahun 2016. Diolah

Lanjutan

No	Kabupaten/ Kota	Kemiskinan (%)	Pendapatan Asli Daerah (ribu rupiah)	Dana Perimbangan (ribu rupiah)	Zakat (ribu rupiah)
1	Simeulue	20,20	44.260.454	642.955.001	1.500.000
2	Aceh Singkil	22,11	49.595.582	585.875.852	4.000.000
3	Aceh Selatan	14,07	118.286.755	940.427.083	6.354.787
4	Aceh Tenggara	14,86	74.180.495	753.577.101	4.287.040
5	Aceh Timur	15,25	113.564.667	1.211.030.030	3.474.054
6	Aceh Tengah	16,84	156.824.966	878.418.088	15.966.284
7	Aceh Barat	20,28	149.228.601	782.481.765	10.885.177
8	Aceh Besar	15,41	113.700.554	964.148.251	15.602.000
9	Pidie	21,43	307.687.536	1.090.577.879	320.917
10	Bireuen	15,87	191.416.743	1.169.358.848	3.556.205
11	Aceh Utara	19,78	237.211.468	1.575.506.163	12.851.939
12	Aceh Barat Daya	18,31	83.358.455	631.526.645	2.292.653
13	Gayo Lues	21,97	46.974.516	583.247.635	1.547.787
14	Aceh Tamiang	14,69	128.487.284	766.184.655	8.584.336
15	Nagan Raya	19,34	100.331.978	684.370.048	6.011.332
16	Aceh Jaya	14,85	58.602.987	539.146.952	3.334.250
17	Bener Meriah	21,14	98.074.368	588.188.507	8.452.694
18	Pidie jaya	21,82	49.328.412	565.960.007	1.964.717
19	Kota Banda Aceh	7,44	240.438.164	763.384.067	13.548.354
20	Kota Sabang	17,66	48.885.658	452.700.881	3.025.741
21	Kota Langsa	11,24	124.092.504	646.024.111	2.862.800
22	Kota Lhokseumawe	12,32	69.702.918	627.233.404	6.093.169
23	Kota Subulussalam	19,71	55.926.797	470.063.793	2.870.414

Data Tahun 2017. Diolah

Lampiran 2. Uji Normalitas



Lampiran 3. Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors

Date: 07/10/19 Time: 19:33

Sample: 1 115

Included observations: 115

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	2.455461	5155.780	NA
X1	0.002153	1480.082	2.584792
X2	0.010246	8860.942	2.218828
X3	0.000722	346.4938	1.420046

Lampiran 4. Uji Heterokedastisitas

Dependent Variable: RESABS

Method: Panel Least Squares

Date: 07/04/19 Time: 23:07

Sample: 2013 2017

Periods included: 5

Cross-sections included: 23

Total panel (balanced) observations: 115

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.640832	0.470875	1.360940	0.1770
X1	0.012514	0.012605	0.992799	0.3235
X2	-0.044399	0.028984	-1.531878	0.1291
X3	0.006832	0.006413	1.065324	0.2896

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.273289	Mean dependent var	0.069190
Adjusted R-squared	0.069156	S.D. dependent var	0.051516
S.E. of regression	0.049702	Akaike info criterion	-2.969653
Sum squared resid	0.219858	Schwarz criterion	-2.349060
Log likelihood	196.7550	Hannan-Quinn criter.	-2.717757
F-statistic	1.338781	Durbin-Watson stat	2.538291

Prob(F-statistic) 0.160862

Lampiran 5. Estimasi Model Data Panel

1. Common Effect Model

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 07/07/19 Time: 20:02

Sample: 2013 2017

Periods included: 5

Cross-sections included: 23

Total panel (balanced) observations: 115

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.211305	1.566991	1.411179	0.1610
X1	-0.116555	0.046401	-2.511927	0.0134
X2	0.186835	0.101224	1.845753	0.0676
X3	-0.070733	0.026874	-2.632058	0.0097

R-squared	0.176099	Mean dependent var	2.828384
Adjusted R-squared	0.153831	S.D. dependent var	0.254413
S.E. of regression	0.234028	Akaike info criterion	-0.032587
Sum squared resid	6.079384	Schwarz criterion	0.062889
Log likelihood	5.873726	Hannan-Quinn criter.	0.006167
F-statistic	7.908302	Durbin-Watson stat	1.945163
Prob(F-statistic)	0.000079		

2. Fixed Effect Model

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 07/04/19 Time: 22:53

Sample: 2013 2017

Periods included: 5

Cross-sections included: 23

Total panel (balanced) observations: 115

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	8.269089	2.076592	3.982047	0.0001
X1	-0.157796	0.055589	-2.838605	0.0056
X2	-0.086188	0.127819	-0.674297	0.5019
X3	-0.055625	0.028282	-1.966803	0.0523

Effects Specification

AR - RAN IRY

Cross-section fixed (dummy variables)

1	-0.243718
2	0.143268
3	0.007978
4	-0.199678
5	-0.288573
6	0.008293
7	0.170762
8	0.007319
9	-0.268607
10	-0.079739
11	0.208593
12	0.114060
13	-0.067177
14	-0.115365
15	0.022382
16	0.333769
17	0.042066
18	-0.101529
19	-0.013806
20	0.125348
21	0.246829
22	0.104509
23	-0.156985

R-squared	0.420504	Mean dependent var	2.82838
Adjusted R-squared	0.257725	S.D. dependent var	0.25441
S.E. of regression	0.219191	Akaike info criterion	-0.00187
Sum squared resid	4.275970	Schwarz criterion	0.61872
Log likelihood	26.10754	Hannan-Quinn criter.	0.25002
F-statistic	2.583273	Durbin-Watson stat	2.32800
Prob(F-statistic)	0.000588		

3. Random effect model

Dependent Variable: Y

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Date: 07/04/19 Time: 22:53

Sample: 2013 2017

Periods included: 5

Cross-sections included: 23

Total panel (balanced) observations: 115

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.211305	1.467643	1.506705	0.1347
X1	-0.116555	0.043459	-2.681965	0.0084
X2	0.186835	0.094807	1.970696	0.0512
X3	-0.070733	0.025170	-2.810227	0.0059

Effects Specification

	S.D.	Rho
Cross-section random	0.000000	0.0000
Idiosyncratic random	0.219191	1.0000

Weighted Statistics

R-squared	0.176099	Mean dependent var	2.828384
Adjusted R-squared	0.153831	S.D. dependent var	0.254413
S.E. of regression	0.234028	Sum squared resid	6.079384
F-statistic	7.908302	Durbin-Watson stat	1.945163
Prob(F-statistic)	0.000079		

Unweighted Statistics

R-squared	0.176099	Mean dependent var	2.828384
Sum squared resid	6.079384	Durbin-Watson stat	1.945163

Lampiran 6. Uji Kelayakan Model

1. Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1.706193	(22,89)	0.0420
Cross-section Chi-square	40.467624	22	0.0095

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 07/04/19 Time: 22:55

Sample: 2013 2017

Periods included: 5

Cross-sections included: 23

Total panel (balanced) observations: 115

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.211305	1.566991	1.411179	0.1610
X1	-0.116555	0.046401	-2.511927	0.0134
X2	0.186835	0.101224	1.845753	0.0676
X3	-0.070733	0.026874	-2.632058	0.0097
R-squared	0.176099	Mean dependent var	2.828384	
Adjusted R-squared	0.153831	S.D. dependent var	0.254413	
S.E. of regression	0.234028	Akaike info criterion	-0.032587	
Sum squared resid	6.079384	Schwarz criterion	0.062889	
Log likelihood	5.873726	Hannan-Quinn criter.	0.006167	
F-statistic	7.908302	Durbin-Watson stat	1.945163	
Prob(F-statistic)	0.000079			

2. Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	21.451603	3	0.0001

** WARNING: estimated cross-section random effects variance is zero.

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
X1	-0.157796	-0.116555	0.001201	0.2341
X2	-0.086188	0.186835	0.007350	0.0014
X3	-0.055625	-0.070733	0.000166	0.2415

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 07/04/19 Time: 22:55

Sample: 2013 2017

Periods included: 5

Cross-sections included: 23

Total panel (balanced) observations: 115

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	8.269089	2.076592	3.982047	0.0001
X1	-0.157796	0.055589	-2.838605	0.0056
X2	-0.086188	0.127819	-0.674297	0.5019
X3	-0.055625	0.028282	-1.966803	0.0523

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.420504	Mean dependent var	2.828384
Adjusted R-squared	0.257725	S.D. dependent var	0.254413
S.E. of regression	0.219191	Akaike info criterion	-0.001870
Sum squared resid	4.275970	Schwarz criterion	0.618723
Log likelihood	26.10754	Hannan-Quinn criter.	0.250026
F-statistic	2.583273	Durbin-Watson stat	2.328000
Prob(F-statistic)	0.000588		